

I. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Perubahan Sosial

Apabila ditelaah dengan seksama, maka dapatlah dikatakan bahwa tidak ada satu masyarakat manusia pun yang tidak berubah. Perubahan masyarakat dapat berupa perubahan yang lambat, sedang, dan yang cepat, atau secara evolusi dan revolusi. Tidak ada suatu masyarakat manusia pun yang berhenti pada suatu titik tertentu sepanjang masa, bahkan kadang kala perubahan itu berjalan dengan lambat secara gradual, sehingga anggota masyarakat tidak menyadari atau tidak memperhatikan akan terjadinya perubahan yang telah melanda kehidupan mereka.

Perubahan yang menyangkut kehidupan manusia disebut perubahan sosial dapat mengenal nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan sebagainya. Karena luasnya bidang di mana mungkin terjadi perubahan-perubahan tersebut (perubahan dalam skala besar atau makro).

Perubahan dalam masyarakat memang telah ada sejak zaman dahulu, namun dewasa ini perubahan-perubahan tersebut terjadi dengan sangat cepat sehingga kadang-kadang membingungkan manusia yang menghadapinya. Perubahan-perubahan ini muncul dalam kaitan yang tak runtut maupun runtut karena aspek

potensi masyarakat sendiri yang memandang terikat oleh waktu dan tempat. Akan tetapi, karena perubahan ini sifatnya berantai, maka perubahan terlihat berlangsung terus menerus walau diselingi keadaan di mana masyarakat mengadakan reorganisasi unsur-unsur struktur masyarakat yang terkena perubahan.

Kehidupan manusia yang makin lama makin bersifat global, perubahan itu jelaslah akan dianggap suatu kebiasaan dan merupakan gejala normal.

Pengaruhnya bisa menjalar dengan cepat ke bagian-bagian dunia lain berkat adanya perkembangan transportasi dan komunikasi modern. Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi yang terjadi di suatu tempat, dengan cepat dapat diketahui oleh masyarakat lain yang berada jauh dari tempat tersebut.

Setiap manusia selama hidup pasti mengalami perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan, wewenang, internalisasi sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Perubahan dalam masyarakat dapat berbentuk sebagai suatu kemajuan (*progress*) dan dapat pula berupa suatu kemunduran (*regress*).

Perubahan dalam arti progress adalah perubahan yang menjadi kemajuan masyarakat. Kemudahan-kemudahan akan diperoleh masyarakat lewat perubahan yang terjadi. Perubahan dalam arti regress adalah yang menjadi suatu kemunduran bagi masyarakat. Perubahan dalam arti ini dapat menyebabkan manusia menjadi frustrasi bahkan apatis. Masyarakat dapat mengalami anomie yaitu masyarakat tidak pola pegangan tertadap nilai-nilai kehidupan. Proses perubahan masyarakat terjadi karena manusia ialah makhluk yang berfikir

dan bekerja.

Manusia di samping itu selalu berusaha untuk memperbaiki nasibnya dan Sekurang-kurangnya berusaha mempertahankan hidupnya. Dalam keadaan Demikian, terjadilah sebab-sebab perubahan yaitu sebagai berikut.

- 1) Inovasi (penemuan baru/pembaharuan).
- 2) Adaptasi (penyesuaian secara sosial dan budaya).
- 3) Adopsi (penggunaan dari penemuan baru/teknologi).

Selain itu, bahwa perubahan masyarakat terjadi karena keinginan manusia untuk menyesuaikan diri dengan keadaan sekelilingnya atau disebabkan oleh ekologi, dimana dianggap bahwa persoalan perubahan masyarakat adalah hasil interaksi banyak faktor. Karena interaksi terjadi di segala bidang, dengan sendirinya bukan saja perubahan terjadi dalam bidang sosial budaya akan tetapi juga dalam bidang ekonomi. (Astrid dalam Ana Susanti, 2005).

Sebab utama dari perubahan masyarakat adalah sebagai berikut.

- 1) Keadaan geografis tempat pengelompokan sosial.
- 2) Keadaan biofisik kelompok sebagai faktor biologi faktor perubahan dapat disebut makanan bergizi, yang bisa menentukan kemajuan atau kemunduran. Biasanya orang akan lebih rajin berfikir bila makan makanan bsgizi dengan kemampuan akan mengadakan kemajuan semaksimal mungkin.
- 3) Kebudayaan, faktor kebudayaan dengan semua tradisinya kadang-kadang bisa menyebabkan bahwa orang tidak mau atau tidak berani mengadakan kemajuan karena bertentangan dengan kebudayaan dan selanjutnya mereka tidak dapat melihat manfaat dari pengadaan perubahan.

- 4) Sifat anomie manusia, sifat anomie (menjauhkan diri dari masyarakat), bisa juga menjadi sebab mengapa perubahan masyarakat sukar dijadikan kemajuan, yaitu keinginan untuk melakukan semuanya sendiri.

Setiap kehidupan masyarakat manusia senantiasa mengalami suatu perubahan. Perubahan-perubahan pada kehidupan tersebut merupakan fenomena sosial yang wajar, oleh karena itu setiap manusia mempunyai kepentingan yang tak terbatas. Perubahan-perubahan akan nampak setelah tatanan sosial dan kehidupan masyarakat yang lama dapat dibandingkan dengan tatanan dan kehidupan masyarakat yang baru. Kehidupan desa dapat dibandingkan antara sebelum dan sesudah mengenal surat kabar, listrik dan televisi.

Perubahan-perubahan yang terjadi bisa merupakan suatu kemajuan atau mungkin suatu kemunduran. Perubahan dapat berupa perubahan yang tidak menarik dalam arti kurang mencolok. Ada juga perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun yang luas, serta ada pula perubahan-perubahan yang sangat lambat sekali, akan tetapi ada juga yang berjalan sangat cepat. Unsur-unsur masyarakat yang mengalami perubahan biasanya adalah mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi sosial, lembaga-lembaga kemasyarakatan, stratifikasi sosial, kekuasaan, tanggung jawab, kepemimpinan dan sebagainya.

Perubahan-perubahan yang besar dalam masyarakat terjadi di semua bidang kehidupan, yaitu dibidang-bidang ekonomi, politik, bahasa, kesenian, hiburan, adat istiadat dan lain-lain. Proses-proses perubahan sosial dewasa ini dapat diketahui dari adanya ciri-ciri atau tanda-tanda tertentu, antara lain: *diferensiasi*

sosial, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong perubahan pemikiran ideologi, politik, dan ekonomi, mobilisasi, *culture konflik*, dan perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan, pertentangan (kontroversi),

Masyarakat maju atau pada masyarakat berkembang, perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan selalu berkaian erat dengan pertumbuhan ekonomi. Menurut Selo Soemarjhan dan Soelaiman Soemardi, bahwa perubahan-perubahan sosial di luar bidang sosial ekonomi tidak dapat dihindarkan oleh karena setiap perubahan dalam suatu lembaga kemasyarakatan akan mengakibatkan pula perubahan-perubahan di dalam lembag-lembaga kemasyarakatan yang lainnya, oleh karena antara lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut selalu ada proses yang mempengaruhi secara timbal balik.

Perubahan dalam masyarakat memang telah ada sejak dahulu. Namun, Perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat pada dewasa ini berjalan dengan sangat cepat sehingga semakin sulit untuk mengetahui bidang-bidang manakah yang akan berubah terlebih dahulu dalam kehidupan masyarakat. Secara umum, perubahan-perubahan itu biasanya bersifat berantai dan saling berhubungan antara satu unsur dengan unsur lainnya.

Kehidupan manusia yang semakin lama semakin bersifat global, perubahan itu jelaslah akan dianggap sebagai suatu kebiasaan dan merupakan gejala normal. Pengaruhnya dapat mejalar dengan cepat ke bagian-bagian dunia lain berkat adanya perkembangan transportasi dan komunikasi modern. Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi yang terjadi di suatu tempat dengan cepat dapat

diketahui oleh masyarakat lain yang berada jauh dari tempat tersebut. Terjadinya perubahan sosial dalam dunia modern dewasa ini, tidak dapat disangkal lagi dan sering kali tidak dapat ditolak, sebagaimana yang di jelaskan oleh Moore sebagai (dalam Jacobus Ranjabar, 2008: 12--13), suatu satuan generalisasi yaitu: (1) bagi masyarakat atau kebudayaan manapun, perubahan cepat berlangsung, atau berlaku secara tetap, (2) perubahan-perubahan itu tidaklah bersifat sementara maupun terpencil secara spasial, karena perubahan terjadi dalam rangkaian tuntutan bukan sebagai krisis sementara yang di ikuti oleh masa rekonstruksi diam-diam, dan akibat perubahan cenderung bergema ke seluruh kawasan atau seluruh dunia, (3) karena perubahan semasa itu mungkin belaku dan akibatnya bermakna di manapun, maka perubahan tersebut memiliki azas ganda, (4) proporsi perubahan semasa itu mungkin berlaku dan akibatnya bermakna dimanapun, atau isu-isu akibat inovasi yang sengaja dilaksanakan akan lebih tinggi proporsinya sebagai himpunan pokok manusia, perubahan-perubahan mana yang kemudian mempengaruhi struktur masyarakat lainnya, (5) sehubungan dengan hal tersebut, lingkup teknologi materi dan strategi sosial menyebar pesat yang akibat bersihnya adalah pertsmbsn secara komulatif walaupun beberapa tatacara atau prosedur relatif menjadi cepat dan menjadi basi, (6) kejadian normal perubahan telah memberikan akibat bagi suatu pengalaman individu yang lebih luas dan aspek fungsional masyarakat dalam dunia modern.

Memahami perubahan sosial dan perubahan budaya (kebudayaan) tampaknya berlangsung secara terus menerus dan tidak dapat dihentikan, hanya saja tingkat kecepatan dan arahnya sajalah yang berbeda-beda. Tidak ada satupun upaya bersejarah yang keberhasilannya dalam menahan perubahan. Perubahan dalam masyarakat bukanlah gejala modern yang istimewa, walaupun pada masa kini

berlangsung berbagai krisis kehidupan manusia, perubahan sebagai proses merupakan asas dalam kehidupan manusia, dengan demikian perubahan mengandung tiga kemungkinan yaitu perubahan sosial, perubahan budaya atau gabungan keduanya.

Perubahan sosial menurut Astrid Susanto (dalam Jacobus Ranjabar, 2008) merupakan sesuatu yang memberikan tekanan akan pentingnya pembangunan untuk diterapkan dalam gejala sosial. Ada dua proses sosial yang dapat dikaitkan dengan pembangunan, yaitu: (1) pertumbuhan atau perkembangan pengetahuan, dan (2) pertumbuhan atau perkembangan kemampuan manusia untuk mengendalikan lingkungannya. Sedangkan perkembangan tidak tergantung kepada penafsiran arti dari sejarah, tetapi lebih didasarkan pada pengetahuan tentang kondisi dan cara-cara terjadinya perubahan sosial serta hal-hal yang menyangkut masyarakat tertentu.

Perubahan sosial menurut Selo Soemardjan mengemukakan bahwa segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Tekanan pada definisi tersebut terletak pada lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai himpunan pokok manusia, perubahan-perubahan mana kemudian mempengaruhi segi-segi struktur masyarakat-masyarakat lainnya.

Alkinson dan Brooten (1978) dalam Nurhidayah (2003: 1), menyatakan definisi perubahan yaitu kegiatan atau proses yang membuat sesuatu atau seseorang berbeda dengan keadaan sebelumnya dan merupakan proses yang menyebabkan perubahan pola perilaku individu atau institusi. Ada empat tingkat perubahan

yang perlu diketahui yaitu pengetahuan, sikap, perilaku, individual, dan perilaku kelompok.

Setelah suatu masalah dianalisa tentang kekuatannya maka pemahaman tentang tingkat-tingkat perubahan dan siklus perubahan akan dapat berguna. Sementara Sosial adalah keadaan dimana terdapat kehadiran orang lain. Kehadiran tersebut bisa nyata kita lihat dan kita rasakan, namun juga bisa dalam bentuk imajinasi. Setiap kita bertemu orang meskipun hanya melihat atau mendengarnya saja itu termasuk situasi sosial. Begitu juga ketika anda sedang menelfon, atau *chatting* (ngobrol) melalui internet. Bahkan setiap kali anda membayangkan adanya orang lain, misalkan melamunkan pacar, mengingat ibu atau bapak, menulis surat pada teman, membayangkan bermain sepakbola bersama, mengenang tingkah laku buruk di depan orang, semuanya itu termasuk sosial.

Berdasarkan uraian di atas, perubahan sosial adalah proses di mana terjadinya perubahan struktur masyarakat yang selalu berjalan sejajar dengan perubahan kebudayaan dan fungsi suatu sistem sosial. Atau juga gejala berubahnya struktur sosial dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Kebosanan manusia sebenarnya merupakan penyebab dari perubahan.

Kehidupan manusia merupakan proses dari satu tahap hidup ke tahap lainnya. Karena itu perubahan sebagai proses dapat menunjukkan perubahan sosial dan perubahan budaya, bahkan berlaku kedua-duanya pada satu runtutan proses. Adapun perubahan sebagai proses, tanpa membicarakan dahulu macam dan arah proses itu dengan singkat perubahan dapat menyatukan pelbagai asas dalam

kehidupan manusia. Proses dalam makna sosial pada hakekatnya ialah perjalanan kehidupan suatu masyarakat yang ditunjukkan oleh dinamikanya, baik mengikuti evolusi biologik dalam daur ulang hidup, maupun perubahan tingkah laku dalam menghadapi situasi mengenai sosial mereka.

Perubahan sosial sebagai proses adalah suatu kenyataan (*realita*) yang dibuktikan oleh kejadian-kejadian antara lain seperti depersonalisasi, adanya frustrasi dan *apathy* (kelumpuhan mental), pertentangan-pertentangan dan perbedaan-perbedaan pendapat mengenai norma-norma yang dianggap mutlak. Ada tidaknya suatu perubahan sosial, yaitu terganggunya keseimbangan (*equilibrium*) di antara kesatuan-kesatuan sosial di dalam masyarakat, hanya dapat dilihat dari kejadian-kejadian nyata (*realita*) yang terjadi sebagai bukti.

Perubahan sosial dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, tergantung pada sudut pengamatan apakah dari sudut aspek, *fragmen* atau dimensi sistem sosialnya. Ini disebabkan karena sistem sosial itu tidak sederhana, tidak hanya berdimensi tunggal, tetapi muncul sebagai kombinasi atau gabungan dari hasil keadaan berbagai komponen sebagai berikut.

1. Unsur-unsur pokok (misalnya: jumlah dan jenis individu, serta tindakan mereka).
2. Hubungan antara unsur (misalnya: ikatan sosial, loyalitas, ketergantungan, hubungan antara individu, integrasi).
3. Berfungsinya unsur-unsur di dalam sistem (misalnya: peran pekerjaan yang dimainkan oleh individu atau diperlukannya tindakan tertentu untuk melestarikan ketertiban sosial).

4. Pemeliharaan batas (misalnya: kriteria untuk menentukan siapa saja yang termasuk anggota sistem, syarat penerimaan individu dalam kelompok, prinsip rekrutmen dalam organisasi dan sebagainya).
5. Subsistem (misalnya: jumlah dan jenis seksi, segmen atau divisi khusus yang dapat dibedakan).
6. Lingkungan (misalnya: keadaan alam atau geopolitik).

Dalam prosesnya perubahan sosial menunjukkan: (1) berbagai perubahan; (2) mengacu pada sistem sosial yang sama (terjadi di dalamnya atau mengubahnya menjadi satu kesatuan); (3) saling berhubungan sebab-akibat dan tak hanya merupakan faktor yang mengiringi atau yang mendahului faktor yang lain; (a) perubahan itu saling mengikuti satu sama lain dalam rentetan waktu (berurutan menurut rentetan waktu). Contoh proses sosial dari tingkat makro ke tingkat mikro, antara lain: industrialisasi, demokratisasi, perluasan perang, mobilisasi gerakan sosial, kristalisasi lingkaran pertemanan dan krisis keluarga.

Ada dua proses sosial yang telah menjadi perhatian sosiolog selama beberapa dekade, yakni yang pertama adalah perkembangan sosial yang melukiskan proses perkembangan potensial yang terkandung dalam sistem sosial. Konsep perkembangan sosial ini juga memuat tiga ciri-ciri tambahan: (1) menuju kearah tertentu dalam arti keadaaa sistem tak terulang sendiri di setiap tingkatan; (2) keadaan sistern pada waktu berikutnya mencerminkan tingkat lebih tinggi dari semula. (Misalnya, terjadi peningkatan diferensiasi struktural, kenaikan output ekonomi, kemajuan ekonomi, atau penambahan penduduk); atau (3) perkembangan ini dipicu oleh kecenderungan yang berasal dari dalam sistem (misalnya: Pertumbuhan penduduk yang diikuti peningkatan kepadatan

penanggulangan kontradiksi internal dengan menciptakan bentuk-bentuk kehidupan baru yang lebih baik menyalurkan kreatifitas bawaan ke arah inovasi yang berarti).

Kedua adalah peredaran sosial. Proses sosial di sini tidak lagi menuju arah tertentu tetapi tidak serampangan. Proses ini ditandai dengan dua ciri: (1) mengikuti pola edaran yaitu keadaan sistem pada waktu tertentu kemungkinan besar muncul kembali pada waktu mendatang dan merupakan replika dari apa yang telah terjadi di masa lalu; dan (2) perulangan ini di sebabkan kecenderungan permanen di dalam sistem karena sifatnya berkembang dengan cara bergerak ke sana kemari. Dengan demikian, walaupun dalam jangka pendek terjadi perubahan tetapi dalam jangka panjang perubahan sosial terjadi karena sistem kembali ke keadaan semula.

1. Faktor-faktor yang Mempeugaruhi Perubahan Sosial

Pada dasarnya perubahan-perubahan sosial terjadi, oleh karena anggota masyarakat pada waktu tertentu merasa tidak puas lagi terhadap keadaan kehidupannya yang lama. Norma-norma dan lembaga sosial, atau sarana penghidupan yang lama dianggap tidak menandai lagi untuk mernenuhi kebutuhan hidup yang baru. Seperti semua proses alamiah lainnya, proses kehidupan manusia merupakan lingkaran yang terus berputar, dan setiap dalam proses tersebut selalu ada faktor yang mempengaruhi proses.

Secara teoritis, faktor-faktor yang tersebut dapat dikelompokkan ke dalam faktor penyebab, pendorong, penghambat dan faktor resiko.

1) Faktor-faktor yang mendorong jalannya perubahan sosial

Faktor-faktor yang mendorong jalannya perubahan sosial yakni sebagai berikut.

- a. Kontak dengan kebudayaan lain, yang mempengaruhi adalah karena adanya proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari individu ke individu lain, dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Proses tersebut dapat mendorong pertumbuhan suatu kebudayaan dan memperkaya kebudayaan-kebudayaan masyarakat.
- b. Sistem pendidikan formal yang maju, pendidikan mengajarkan kepada individu aneka macam kemampuan. Pendidikan memberikan nilai-nilai tertentu bagi manusia, terutama dalam membuka pikirannya serta menerima hal-hal baru dan juga berfikir secara ilmiah dan obyektif.
- c. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju, apabila sikap tersebut ada dalam masyarakat maka masyarakat merupakan pendorong untuk menciptakan hasil-hasil karya yang baru.
- d. Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang, yang bukan merupakan delik.
- e. Sistem terbuka lapisan masyarakat (*open stratification*) dengan sistem terbuka, berarti memberikan kesempatan kepada para individu untuk maju atas dasar kemampuan sendiri.
- f. Penduduk yang heterogen, masyarakat yang terdiri dari kelompok sosial, mempunyai latar belakang kebudayaan yang berbeda, ras yang berbeda, ideologi yang berbeda yang mendorong bagi terjadinya perubahan-perubahan dalam masyarakat.

- g. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Ketidakpuasan selalu lama dalam sebuah masyarakat berkemungkinan akan mendatangkan revolusi.
- h. Orientasi ke masa depan.
- i. Nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya.

2) Faktor-faktor yang Menghalangi Terjadinya Perubahan

Adapun faktor-faktor yang menghalangi perubahan sosial, yakni sebagai berikut.

- a. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain.
- b. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat.
- c. Sikap masyarakat yang sangat tradisional.
- d. Adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam kuat atau *vested interests*.
- e. Rasa takut akan terjadinya kegoyangan pada integrasi kebudayaan.
- f. Prasangka terhadap hal-hal baru atau sikap yang tertutup.
- g. Hambatan-hambatan yang bersifat ideologis.
- h. Adat atau kebiasaan.
- i. Nilai bahwa hidup ini pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki.

3) Faktor-Faktor Resiko Terjadinya Perubahan Sosial

Apabila perubahan sosial terjadi dengan sangat cepat, maka resiko negatifnya juga akan sangat besar. Individu lantas bisa menjadi merasa terasing. Kesepian, dan putus asa. Apalagi perubahan sosial itu terjadi secara mendadak pada

individu, maka akan mengacaukan peranan individu. Faktor- faktor resiko perubahan sosial yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya kepentingan individu dan kelompok, apabila individu dan kelompok mempunyai kepentingan sendiri, maka mereka akan muncul sebagai pendukung perubahan dengan mengharapkan keuntungan dari perubahan sosial tersebut.
- b. Timbulnya masalah sosial, hal ini terjadi karena masyarakat kurang menerima perubahan yang terjadi.
- c. Kesenjangan budaya (*cultural lag*), yakni perbedaan kadar perubahan dalam masyarakat, tidak adanya keselarasan budaya yang berubah dalam masyarakat.
- d. Kehilangan semangat hidup, hal ini dikarenakan tingginya tingkat kecepatan perubahan maupun ketidakpahaman relatif masyarakat tersebut tentang proses perubahan.

2. Bentuk-bentuk Perubahan Sosial

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat dibedakan dalam beberapa bentuk. Diantaranya sebagai berikut.

1) Perubahan Evolusi dan Perubahan Revolusi

Evolusi sosial mempunyai anggapan dasar yaitu sebagai berikut. (1) Umat manusia itu adalah bagian dari pada alam, dan bekerja sesuai dengan hukum alam pula. (2) Hukum alam itu yang menguasai perkembangan, tidak mengalami perubahan sepanjang zaman. (3) proses alamiah itu bergerak secara progresif dan yang sederhana menuju ke arah yang lebih kompleks, dari yang tidak

terorganisasikan menuju kepada yang diorganisasikan secara lengkap. (4)
Manusia di seluruh dunia mempunyai potensi yang sama akan tetapi berbeda secara fundamental dalam perkembangan kualitatif mengenai intelegensi dan pengalamannya.

Perubahan evolusi merupakan perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam proses yang lambat, dalam waktu yang cukup lama dan tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Perubahan sosial ini terjadi tidak lain karena adanya dorongan dari usaha-usaha masyarakat itu sendiri dalam rangka menyesuaikan diri terhadap kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan perkembangan masyarakat pada waktu tertentu.

Menurut Herbert Spencer yang antara lain mengatakan bahwa kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi. Masyarakat itu merupakan hasil dari masyarakat yang homogen ke kelompok yang heterogen sifat dan susunannya. Perubahan semacam ini tidak pasti arahnya, karena arus perubahannya semakin sama sekali tidak diatur atau direncanakan, mungkin perubahannya menuju pada bentuk kehidupan yang sempurna, atau mungkin sebaliknya.

Sedangkan perubahan yang bersifat revolusi merupakan perubahan yang cepat dan tidak adanya suatu perencanaan sebelumnya. Soerjono Soekamto mengemukakan bahwa adanya beberapa syarat terjadinya suatu revolusi, yakni: (1) adanya keinginan umum untuk mengadakan suatu perubahan; 2) adanya seseorang yang di percaya mampu untuk memimpin; (3) pemimpin dapat membentuk suatu program-program sesuai dengan keinginan masyarakat; (4)

pemimpin harus menunjukkan suatu tujuan kepada masyarakat dan (5) harus ada momentum untuk revolusi.

Ditinjau dari sudut pandang revolusi, bahwa perubahan sosial sering berhadapan dengan letupan sosial bila terjadi: (1) struktur masyarakat yang kondusif antara lain kondisi masyarakat yang struktural dan sosial memperlihatkan perbedaan yang mencolok. Adanya jurang yang lebar menganga antara orang miskin dan kaya, pejabat yang demonstratif memamerkan kekayaan atau mengutamakan atribut sosial, (2) adanya ketegangan sosial, antara lain dimanifestasikan ketidakharmonisan kelompok sosial. Ketidakharmonisan mengandung konflik kelompok. (3) kepercayaan bersama (bukan agama) yang dihayati. Dalam masyarakat dan kepercayaan bersama bahwa menjadi pejabat harus kaya atau kekayaan yang dimiliki pejabat itu adalah hasil pemerasan korupsi dari harta negara, tentu hal ini menimbulkan kecurigaan pada rakyat. (4) kemungkinan mobilisasi. Memudahkan mobilisasi dengan memasuki kelompok yang memperjuangkan nasib organisasi sosial. (5) kontrol sosial yang tidak berfungsi. Kontrol sosial berfungsi mengawasi tindakan penyimpangan atau memapankan status quo. Jadi bila tidak ada lagi alat yang memapankan kondisi masyarakat maka mudah penyimpangan timbul.

2) Perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan.

Perubahan yang direncanakan merupakan perubahan-perubahan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan yang didasarkan pada perencanaan yang matang oleh pihak-pihak yang menghendaki perubahan-perubahan tersebut (*agent of change*).

Menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu sebelumnya oleh pihak-pihak yang menghendaki perubahan. Sementara itu perubahan yang tidak direncanakan, merupakan perubahan-perubahan yang berlangsung di luar kehendak dan pengawasan masyarakat.

B. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi merupakan keadaan yang menunjukkan pada kemampuan seseorang, keluarga dan perlengkapan materiil yang dimiliki oleh keluarga itu dimana keadaan sosial ekonomi ini bertaraf baik, sedang dan kurang.

Chapin dan Hartini (2010) mengemukakan bahwa status sosial merupakan posisi yang ditempati oleh individu atau keluarga berkenaan dengan ukuran rata-rata yang umum ditandai dengan pendapatan yang efektif pemilikan barang-barang, dan partisipasi dalam aktivitas kelompok dan komunitasnya.

Adapun kondisi sosial ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keadaan masyarakat di Desa Trimomukti yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia baik yang menyangkut kesejahteraan keluarga itu sendiri, maupun kesejahteraan sosial masyarakat di lingkungan kelurahan tersebut.

Dengan demikian status sosial ekonomi adalah tingkatan atau kedudukan sebuah keluarga di tengah kelompoknya dan posisi yang disandangnya dilengkapi dengan berbagai faktor diantaranya tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan aktivitas dalam masyarakat yang dapat meningkatkan prestasi.

Menurut Todaro dalam terjemahan Mursid sebagaimana yang dikutip oleh Rully

Firmansyah (2006:17) disebutkan bahwa di dalam ukuran-ukuran ekonomi tradisional cukup dimaksudkan hanya semata-mata berdasarkan tingkat dan pertumbuhan penghasilan secara keseluruhan atau penghasilan per kapita. Akan tetapi halnya pandangan ekonomi yang baru tentang pembangunan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan taraf hidup, termasuk menambah, mempertinggi, dan pemeratakan pendapatan, penyediaan lapangan kerja yang memadai, pendidikan yang lebih baik dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya.
2. Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian atau pemerataan bahan-bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan.
3. Memperluas jangkauan pilihan sosial ekonomi bagi semua individu dan nasional dengan cara membebaskan diri dari sikap ketergantungan dan kebodohan melalui pendidikan.

Maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi indikator kondisi ekonomi adalah tingkat pendapatan dan pemenuhan kebutuhan pokok.

Mulyono Sumardi dan Hans Dieter Evers (2001: 21) mengatakan bahwa ciri-ciri individu yang memiliki status sosial ekonomi tinggi adalah sebagai berikut.

1. Lebih berpendidikan.
2. Mempunyai status sosial yang lebih tinggi. Status sosial ini di tandai dengan pendapatan tingkat kehidupan, kesehatan, prestise, pekerjaan atau jabatan.
3. Mempunyai tingkat mobilitas ke atas lebih besar yaitu cenderung untuk lebih meningkatkan lagi status sosial ekonomi dan mereka mengadakan inovasi sebagai salah satu jalan untuk mempertinggi status tersebut.
4. Mempunyai ladang lebih luas.
5. Lebih berorientasi pada ekonomi komersial produk.
6. Memiliki sikap lebih terbuka terhadap kredit.
7. Mempunyai pekerjaan yang lebih spesifik.

Dari pendapat di atas, yang berkenaan dengan kondisi ekonomi masyarakat desa

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal

Kepemilikan rumah dapat diukur sebagai berikut

- 1) Status kepemilikan rumah tempat tinggal, kriteriannya sebagai berikut.
 - a. Rumah milik sendiri.
 - b. Rumah menyewa, yaitu rumah pekarangan milik orang lain dengan imbalan uang sesuai dengan kesepakatan bersama antara si penyewa dan si pemilik.
 - c. Rumah magersari, yaitu rumah milik sendiri yang didirikan di atas pekarangan orang lain.
 - d. rumah menumpang, yaitu rumah yang digunakan sebagai tempat tinggal tersebut adalah milik orang lain, tanpa ada imbalan apapun.

2) Bentuk rumah

Bentuk rumah mencirikan keadaan ekonomi seseorang, semakin tinggi tingkat ekonomi seseorang, maka semakin bagus bentuk rumah yang dimilikinya.

3) Pemilikan alat rumah tangga

Pemilikan alat rumah tangga ini dapat mencirikan bahwa seseorang dikategorikan mampu dan tidak mampu tingkat ekonomi, pemilikan alat rumah tangga ini dapat diukur dari kepemilikan barang-barang elektronik.

2. Pendapatan

Kemiskinan erat kaitannya dengan pendapatan suatu keluarga untuk mencukupi kebutuhan dasar hidupnya. Pendapatan tersebut diperoleh melalui kerja baik di

sektor formal maupun informal. Pada kenyataannya, angka pengangguran di Indonesia masih menunjukkan angka yang memprihatinkan.

Pendapatan yang di maksud dalam penelitian ini adalah penghasilan. Dalam kamus istilah ekonomi (Eti Rochaeti, 2005: 120), pendapatan adalah berupa *equivalen* (sederajat) dengan uang yang diperoleh dalam masa tertentu yaitu berupa penghasilan seseorang seperti gaji, bunga sewa dan honorarium.

Sedangkan menurut Valery H. Hull dalam Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi (1995: 30), pendapatan keluarga adalah gambaran yang lebih tepat dari keadaan sosial ekonomi keluarga dalam masyarakat. Pendapatan atau penghasilan merupakan jumlah seluruh pendapatan atau penghasilan keluarga. Pendapatan membagi membagi keluarga ke dalam tiga kelompok pendapatan, yaitu pendapatan tinggi, pendapatan sedang dan pendapatan rendah.

Kesimpulan dari uraian di atas bahwa yang dimaksud dengan pendapatan adalah jumlah keseluruhan pendapatan yang di peroleh atau sejumlah uang dan materi lainnya yang di terima seseorang atau sekelompok orang masyarakat lainnya sebagai imbalan jasa yang telah diberikan dan di dapat dari sektor produksi yang berupa gaji, sewa tanah, bunga modal, atau bagi hasil maupun pendapatan imbalan.

Ace Partadireja (1985: 6) dikutip dalam Dwi Supriati (2004) menyebutkan macam-macam pendapatan, antara lain sebagai berikut.

- 1) Pendapatan pokok adalah pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan secara tetap untuk memperoleh atau memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Untuk menghitung pendapatan pokok seseorang, dapat dilihat dari pekerjaan atau mata pencahariannya.

- 2) Pendapatan tambahan adalah pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan sampingan suami, istri atau hasil yang diperoleh anggota keluarga lainnya, dan hasilnya digunakan untuk kepentingan keluarga.
- 3) Pendapatan keseluruhan adalah pendapatan pokok ditambah dengan pendapatan baik yang diperoleh suami, istri maupun dari anggota keluarga lainnya.

Pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diperoleh suami, istri dan anggota keluarga lainnya yang bersumber baik dari pekerjaan pokok maupun pekerjaan tambahan. Hal-hal yang mempengaruhi pekerjaan tambahan adalah sebagai berikut.

- 1) Pendidikan
- 2) Pekerjaan.
- 3) Jumlah anak yang dimiliki.

Pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan yang diperoleh masyarakat yang bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI). Hal lain yang dapat dilihat adalah dalam bentuk pengiriman penghasilan yang dilakukan oleh TKI untuk keluarganya. Yang bertujuan sebagai berikut.

- 1) Menyokong keluarga, uang yang dikirim TKI berfungsi untuk menyokong perekonomian keluarga yang berada di rumah.
- 2) Membayar hutang, TKI yang tidak mempunyai uang cukup untuk membiayai perjalanannya ke begara yang di tuju, melakukan pinjaman kepada orang lain atau menggadaikan barang-barang yang lain. Uang yang dikirim para TKI dapat digunakan untuk membayar hutang atau menebus barang-barang atau tanah yang digadaikan.

- 3) Penanaman modal, uang yang dikirim ke daerah dapat dijadikan bentuk penanaman modal.
- 4) Jaminan hari tua, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di hari tua. Misalnya untuk membangun rumah.

3. Pemenuhan Kebutuhan Pokok

Pembicaraan mengenai pengeluaran maka tidak luput dari kebutuhan pokok rumah tangga untuk dapat hidup layak, maka harus memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kebutuhan pokok adalah segala sesuatu jika tidak terpenuhi akan menghentikan kehidupan seseorang. Kebutuhan dasar ini meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan keamanan. Untuk mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan pokok keluarga dalam penelitian ini adalah dapat dipakai standar kebutuhan pokok yang sudah ditetapkan pemerintah seperti yang dijelaskan oleh Singarimbun dalam Suwardi dan Dieter (1985: 6), bahwa pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pokok telah menetapkan sembilan bahan pokok yaitu beras, ikan, gula pasir, minyak goreng, garam, minyak tanah, sabun cuci, batik kasar, tekstil Kasar.

C. Kemiskinan

Pengertian kemiskinan umumnya selalu dikaitkan hanya dengan sektor ekonomi semata. Padahal kemiskinan bisa dilihat dari sisi sosial maupun budaya masyarakat. Pada prinsipnya kemiskinan menggambarkan kondisi ketiadaan kepemilikan dan rendahnya pendapatan, atau secara lebih rinci menggambarkan suatu kondisi tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan,

papan, dan sandang. Beberapa definisi menggambarkan kondisi ketiadaan tersebut. Salah satunya adalah definisi kemiskinan yang digunakan BPS, yang menjelaskan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 2002).

Dimensi Kemiskinan juga bersifat kompleks, oleh karena itu para ahli mengklasifikasikannya dalam tiga jenis kemiskinan (Harniati, 2010), yaitu sebagai berikut.

- 1) Kemiskinan alamiah, merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang rendah. Kondisi alam dan sumber daya yang rendah membuat peluang produksi juga rendah. Khusus untuk sektor pertanian, kemiskinan yang terjadi lebih diakibatkan kualitas lahan dan iklim yang tidak mendukung aktivitas pertanian. Dari seluruh wilayah di Indonesia, lahan subur justru banyak dijumpai di pulau Jawa. Sedangkan di luar Jawa, sumber daya alam yang subur jumlahnya terbatas, hal ini membuat petani hanya dapat menanam lahan sewaktu ada hujan, keadaan ini menyebabkan hasil produksi hanya dapat diperoleh sekali dalam satu tahun.
- 2) Kemiskinan kultural, kemiskinan yang terkait erat dengan sikap seseorang atau kelompok dalam masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya, sekalipun ada usaha untuk memperbaiki dari pihak lain yang membantunya. Kemiskinan ini dapat pula disebabkan karena sebagian sistem dalam tradisi masyarakat berkontribusi dalam menyebabkan terjadinya

kemiskinan masyarakat. Sebagai contoh adalah sistem waris yang mengakibatkan pembagian lahan, sehingga kepemilikan lahan per keluarga semakin lama menjadi semakin sempit.

- 3) Kemiskinan Struktural, kemiskinan yang secara langsung maupun tidak disebabkan oleh tatanan kelembagaan atau struktur sosial dalam masyarakat. Tatanan kelembagaan atau struktur sosial disini dapat diartikan sebagai tatanan organisasi maupun aturan permainan yang diterapkan. Kebijakankebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah seringkali menyebabkan sebagian kelompok dalam masyarakat mengalami kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi lebih disebabkan keterbatasan bahkan tidak dimilikinya akses kelompok miskin kepada sumber daya-sumber daya pembangunan yang ada. (Indra, kompas online, 2007). Kemiskinan yang disebabkan oleh struktur sosial yang berlaku ini telah menyebabkan terkurungnya kelompok masyarakat tertentu dalam suasana kemiskinan, yang bahkan telah berlangsung secara turun temurun. Kemiskinan struktural hanya dapat diatasi jika terjadi suatu proses perubahan struktur dalam masyarakat secara mendasar.

Ketiga dimensi menggambarkan bahwa penyebab kemiskinan tidak lah tunggal, bisa berasal dari kondisi alam yang tidak memberikan keuntungan secara ekonomi, seperti yang diperlihatkan kemiskinan alamiah. Namun bisa juga kemiskinan disebabkan karena faktor manusianya, seperti yang digambarkan pada kemiskinan secara kultural, bahkan bisa juga karena kondisi yang dibentuk oleh manusia melalui struktur dan institusi dalam masyarakat, seperti diperlihatkan dimensi kemiskinan struktural. Kemiskinan yang dialami oleh petani dipedesaan

selain karena rendahnya kualitas sumber daya manusia juga karena struktur dan kebijakan sektor pertanian yang kurang mengembangkan sektor pertanian.

kemiskinan struktural di wilayah perdesaan umumnya dialami oleh para petani yang tidak memiliki lahan atau buruh tani dan buruh penggarap dimana hasil pertaniannya tidak mencukupi untuk memberi makan dirinya dan keluarganya.

(Soedjatmoko, 1980: 46--61)

Adanya kemiskinan struktural dalam masyarakat dapat dilihat melalui beberapa karakteristik dari kemiskinan struktural itu sendiri. Ciri pertama yang mudah dilihat adalah tidak terjadinya mobilitas sosial secara vertikal, jika pun terjadi prosesnya berjalan sangat lamban. Tidak terjadinya mobilitas secara vertikal menyebabkan kelompok yang miskin tetap hidup dengan kemiskinannya, sedangkan kelompok yang kaya akan tetap menikmati kekayaannya. Kondisi ini disebabkan karena adanya kungkungan struktural yang membuat tidak adanya keinginan untuk meningkatkan taraf hidup. Kungkungan struktural tersebut telah membentuk berbagai rintangan bagi kelompok miskin, sebagai contoh adalah mahal biaya pendidikan menyebabkan kelompok miskin tidak bisa mencapai pendidikan yang tinggi untuk bisa melepaskan diri dari jerat kemiskinan.

Ciri lain dari keberadaan kemiskinan struktural adalah adanya tergantungan yang tinggi kelompok miskin terhadap kelompok sosial di atasnya. Ketergantungan ini yang mengurangi kemampuan kelompok miskin untuk memiliki *bargaining* posisi dalam hubungan sosial yang memang telah timpang, misalnya antara pemilik tanah dengan petani penggarap atau buruh tani. Para petani penggarap tak bisa menentukan bagaimana pembagian hasilnya, buruh tani tak dapat menentukan berapa upahnya, semuanya tergantung pada pemilik tanah. Pada kondisi seperti ini kelompok yang lebih rendah relatif tidak dapat memperbaiki kehidupannya.

1. Penyebab Kemiskinan

Penyebab kemiskinan bersifat kompleks dan terbagi dalam beberapa dimensi penyebab kemiskinan (Cox, 2004: 1--6), yaitu sebagai berikut.

1) Kemiskinan yang diakibatkan oleh globalisasi.

Globalisasi melahirkan negara pemenang dan negara kalah. Pemenang umumnya adalah Negara-negara maju, sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi. Karena negara-negara berkembang terpinggirkan maka jumlah kemiskinan di negara-negara berkembang jauh lebih besar dibandingkan negara-negara maju.

2) Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan.

Pola pembangunan yang diterapkan telah melahirkan beberapa bentuk kemiskinan, seperti kemiskinan perdesaan, adalah kondisi wilayah desa yang mengalami kemiskinan akibat proses pembangunan yang meminggirkan wilayah perdesaan; kemiskinan perkotaan, yaitu kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan ekonomi, dimana tidak semua kelompok memperoleh keuntungan.

3) Kemiskinan sosial.

Dimensi ketiga ini melihat pada kondisi sosial masyarakat yang tidak menguntungkan beberapa kelompok dalam masyarakat. Misalnya kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak dan kelompok minoritas merupakan kemiskinan yang diakibatkan kondisi sosial yang tidak menguntungkan kelompok tersebut. Kondisi sosial yang dimaksud misalnya bias gender, diskriminasi, atau eksploitasi ekonomi.

4) Kemiskinan konsekuensial.

Dimensi keempat ini menekankan faktor-faktor eksternal yang menyebabkan kemiskinan. Faktor-faktor yang dimaksud adalah konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk. Faktor-faktor tersebut lah yang menyebabkan munculnya kemiskinan dalam masyarakat.

Dimensi yang dikemukakan oleh Cox ini jauh lebih luas dari apa yang dikemukakan oleh para ahli sebelumnya. Hal ini dikarenakan Cox memasukan imensi globalisasi sebagai salah satu dimensi. Melalui dimensi ini dapat dijelaskan bahwa tingkat kemiskinan di suatu negara dapat disebabkan oleh pola perekonomian dunia. Perekonomian dunia juga dapat memberikan pengaruh pada pola pembangunan di dalam suatu negara. Dimana pembangunan itu sendiri dapat menjadi sumber penyebab kemiskinan bila pola pembangunan yang diterapkan tidak seimbang untuk setiap wilayah.

Kemiskinan yang dialami individu atau rumah tangga tidak dapat dilepaskan dari pencapaian tingkat kesejahteraannya. Adanya kemiskinan dalam suatu masyarakat merupakan tanda dari tidak tercapainya kesejahteraan individu atau rumah tangga. Untuk melihat tingkat kesejahteraan tersebut ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan, yaitu (Zastrow, 2000;237) sebagai berikut.

a) Pendekatan Absolut

Pendekatan ini melihat pada batas minimum yang harus dimiliki untuk mencapai kebutuhan minimum suatu keluarga. Suatu keluarga dikatakan miskin bila tidak mempunyai penghasilan atau tidak mencapai batas

minimum yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Melalui pendekatan ini akan dapat diketahui jumlah keluarga miskin. Dengan batas minimum yang sama maka akan dapat diperbandingkan satu daerah dengan daerah lainnya. Kelemahan pendekatan ini adalah pada kenyataan bahwa kebutuhan setiap keluarga tidak akan sama, karena tergantung pada waktu dan tempat. Kemiskinan sangat terkait dengan kondisi-kondisi dimasyarakatnya. Namun demikian pendekatan ini masih banyak digunakan terutama terkait dengan perbandingan jumlah penduduk miskin.

b) Pendekatan Relatif

Pendekatan ini membandingkan antara pendapatan seseorang atau rumah tangga dengan rata-rata pendapatan populasi. Pendekatan ini lebih melihat pada ketidakseimbangan pendapatan. Selama ketidakseimbangan pendapatan ada maka kemiskinan akan tetap ada. Pendekatan ini sudah mengakomodasi bahwa kemiskinan tidak akan sama di semua tempat, namun pendekatan ini justru tidak dapat menunjukkan seberapa buruk atau seberapa baik orang mendistribusikan pendapatan dalam kehidupan nyata.

c) Pendekatan Kebutuhan Dasar

Pendekatan yang dikemukakan oleh Townsend menekankan pada dua unsur penting, (eksiklopedi ilmu-ilmu sosial, 2000), yaitu: *pertama*, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi pendapatan yang tidak dapat mencukupi pemenuhan kebutuhan subsisten akan pangan, papan, pakaian, dan barang-barang rumah tangga tertentu. *Kedua*, pendapatan tersebut juga tidak dapat memenuhi jasa-jasa penting lainnya, seperti air minum yang aman,

sanitasi, transportasi umum, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.

Pendekatan ini lebih lengkap dibanding dua pendekatan sebelumnya, karena lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan, dimana hal tersebut berbeda-beda tergantung pada tempat dan waktu.

Definsi kemiskinan yang digunakan dalam melihat peningkatan pendapatan rumah tangga petani miskin adalah kemiskinan struktural dengan pendekatan kebutuhan dasar. Hal ini dikarenakan kondisi kemiskinan yang dialami petani tidak terlepas dari kebijakan pembangunan khususnya sektor pertanian yang diterapkan oleh pemerintah, dan pemenuhan kebutuhan dasar merupakan pendekatan yang lebih bisa menggambarkan secara menyeluruh kondisi kemiskinan yang dialami petani.

Berkaitan dengan kemiskinan struktural dalam rumah tangga petani maka salah satu sumber daya dalam rumah tangga yang juga mengalami kemiskinan struktural adalah perempuan sebagai istri maupun anak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ruspini dalam *longitudinal research in the social sciences*, ditemukan bahwa kemiskinan struktural telah menyebabkan ketergantungan, pengabaian sosial (*social exclusion*), dan ketiadaan akses bagi perempuan dalam perubahan-perubahan sosial. Kondisi tersebut berakar pada tiga sistem utama (Ruspini, 2000), yaitu:

- 1) Ruang privat rumah tangga.

Kekuasaan dalam rumah tangga dan keluarga erat kaitannya dengan kontrol terhadap sumber keuangan dan partisipasi perempuan dalam pasar kerja.

Umumnya laki-laki atau suami memiliki akses yang lebih besar terhadap dunia kerja sementara perempuan lebih diarahkan untuk mengelola sektor keluarga yang

tidak produktif. Hasil dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan pun tidak dialami secara merata dalam keluarga. Keluarga-keluarga yang lebih miskin biasanya menyerahkan pengelolaan keuangannya pada perempuan, sementara keuangan keluarga dengan kemampuan ekonomi yang lebih baik selalu berada dibawah kontrol laki-laki.

Studi yang lain menunjukkan perempuan yang memiliki beban untuk menjaga kehidupan keluarga biasanya mengutamakan pembagian bagi anak-anak atau anggota keluarga lainnya. Dalam situasi ketika sumber daya sangat terbatas, perempuan terpaksa mengkonsumsi sisa-sisa pembagian tersebut. Tak mengherankan jika kualitas hidup perempuan lebih buruk dari laki-laki dalam keluarga.

2) Dalam pembagian kerja secara seksual perempuan lebih banyak mengerjakan tugas-tugas yang tersembunyi dan tidak dibayar. Perempuan adalah kelas kedua dalam susunan pasar kerja. Sementara kehidupan perempuan dibentuk oleh tanggung jawabnya terhadap keluarga baik ketika melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dibayar maupun tidak. Itulah sebabnya meskipun perempuan telah bekerja disektor-sektor produktif perempuan tetap terbebani oleh tanggungjawab moral untuk mendedikasikan hasil kerjanya pada keluarga.

3) Dampak Negatif globalisasi telah menciptakan sistem ekonomi yang terintegrasi dalam sebuah pasar dunia. Sistem ekonomi menjadi lebih banyak mengabaikan program-program kesejahteraan, mengurangi pengeluaran-pengeluaran untuk masyarakat, dan menekan biaya kesejahteraan keluarga.

Kondisi ini menyebabkan beban tambahan bagi perempuan karena kesejahteraan keluarga kemudian menjadi beban yang harus diatasi oleh perempuan dengan dana terbatas.

Penjelasan Ruspini menggambarkan secara jelas bahwa perempuan merupakan kelompok yang dibentuk menjadi kelompok miskin dalam masyarakat. Bukan hanya komunitasnya, negara, bahkan dunia telah mempengaruhi posisi marginal dari perempuan. Perempuan dalam rumah tangga miskin di desa juga tidak terlepas dari tiga sistem tersebut. Kondisi tersebut telah menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya dalam keluarga miskin padahal perempuan merupakan salah satu sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga petani miskin.

2. Indikator Kemiskinan

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yang dialami seseorang atau sekelompok orang adalah indikator kemiskinan yang digunakan oleh Bappenas. Indikator kemiskinan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1) Keterbatasan Pangan

Merupakan ukuran yang melihat kecukupan pangan dan mutu pangan yang dikonsumsi. Ukuran indikator ini adalah stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin, dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu.

2) Keterbatasan akses kesehatan

Merupakan ukuran yang melihat keterbatasan akses kesehatan dan rendahnya mutu layanan kesehatan. Keterbatasan akses kesehatan dilihat dari kesulitan

mendapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya layanan reproduksi, jauhnya jarak fasilitas layanan kesehatan, mahalny biaya pengobatan dan perawatan. Kelompok miskin umumnya cenderung memanfaatkan pelayanan di puskesmas dibandingkan dengan rumah sakit.

3) Keterbatasan akses pendidikan

Indikator ini diukur dari mutu pendidikan yang tersedia, mahalny biaya pendidikan, terbatasnya fasilitas pendidikan, rendahnya kesempatan memperoleh pendidikan.

4) Keterbatasan akses pada pekerjaan

Indikator ini diukur dari terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, lemahnya perlindungan terhadap asset usaha, perbedaan upah, lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan.

5) Keterbatasan akses terhadap layanan perumahan dan sanitasi

Indikator yang digunakan adalah kesulitan memiliki rumah yang sehat dan layak huni, dan lingkungan permukiman yang sehat dan layak.

6) Keterbatasan akses terhadap air bersih

Indikator yang digunakan adalah sulitnya mendapatkan air bersih, terbatasnya penguasaan sumber air, dan rendahnya mutu sumber air.

7) Keterbatasan akses terhadap tanah

Indikator yang digunakan adalah struktur kepemilikan dan penguasaan tanah, ketidakpastian kepemilikan dan penguasaan tanah. Akses terhadap tanah ini merupakan persoalan yang mempengaruhi kehidupan rumah tangga petani.

8) Keterbatasan akses terhadap sumber daya alam

Indikator yang digunakan adalah buruknya kondisi lingkungan hidup, rendahnya sumber daya alam. Indikator ini sangat terkait dengan penghasilan yang bersumber dari sumber daya alam, seperti daerah perdesaan, daerah pesisir, dan daerah pertambangan.

9) Tidak adanya jaminan rasa aman

Indikator ini berkaitan dengan tidak terjaminnya keamanan dalam menjalani kehidupan baik sosial maupun ekonomi.

10) Keterbatasan akses untuk partisipasi

Indikator ini diukur melalui rendahnya keterlibatan dalam pengambilan kebijakan.

11) Besarnya beban kependudukan

Indikator ini berkaitan dengan besarnya tanggungan keluarga, dan besarnya tekanan hidup.

Indikator-indikator yang dikemukakan oleh Bappenas mencakup keseluruhan aspek yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya kemiskinan, namun indikator-indikator ini masih sangat umum sehingga diperlukan penjelasan yang lebih rinci yang bisa dilihat secara langsung dalam kehidupan masyarakat.

Indikator yang dikemukakan oleh Komite penanggulangan Kemiskinan (KPK) jauh lebih spesifik dalam melihat kondisi kemiskinan yang dialami masyarakat.

(Syahyuti, 2006: 95). Keluarga miskin menurut komite ini adalah keluarga yang

tidak mampu memenuhi satu atau lebih indikator berikut ini, yaitu sebagai berikut.

- a) Paling kurang sekali seminggu makan daging, ikan, dan telur.
- b) Sekali setahun seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu setel pakaian baru.
- c) Lantai rumah paling kurang 8 m² perpendhuni

Sedangkan kategori keluarga miskin sekali adalah jika keluarga tidak mampu memenuhi satu atau lebih indikator berikut ini.

- 1) Seluruh anggota keluarga umumnya makan dua kali sehari atau lebih.
- 2) Memiliki pakain berbeda untuk dirumah, bekerja, sekolah, dan berpergian.
- 3) Bagian lantai terluas bukan dari tanah

Kondisi kemiskinan yang dialami sekelompok masyarakat berbeda-beda atau bersifat heterogen, oleh karena itu perlu dilakukan tingkatan untuk dapat mengetahui kondisi terparah dari kemiskinan. Tingkatan dari kondisi kemiskinan yang terdapat dalam masyarakat dapat dikelompokkan dalam tiga tingkatan (Sahyuti, 2006: 95), yaitu sebagai berikut.

- 1) Kelompok yang paling miskin (*destitute*), merupakan kelompok yang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan, tidak memiliki sumber pendapatan, dan tidak memiliki akses terhadap pelayanan sosial.
- 2) Kelompok miskin (*poor*), merupakan kelompok kemiskinan yang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan, namun masih memiliki akses terhadap pelayanan sosial dasar.
- 3) Kelompok Rentan (*vulnerable group*) merupakan kelompok miskin yang

memiliki kehidupan yang lebih baik, namun mereka rentan terhadap berbagai perubahan sosial disekitarnya.

D. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan, karena pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Baik dalam kehidupan keluarga, maupun dalam kehidupan bangsa dan negara. Maju mundurnya suatu bangsa sebagian besar ditentukan oleh maju mundurnya pendidikan di negara itu.

Mengingat pentingnya pendidikan itu bagi kehidupan bangsa dan negara, maka hampir seluruh negara di dunia ini menangani secara langsung masalah-masalah yang berhubungan dengan pendidikan. Dalam hal ini, masing-masing negara itu menentukan sendiri dasar dan tujuan pendidikan.

Demikian pula masing-masing orang mempunyai bermacam-macam tujuan pendidikan, yaitu melihat kepada cita-cita, kebutuhan dan keinginannya. Ada yang berharap dengan pendidikan anaknya kelak akan menjadi orang yang besar yang berjasa kepada nusa dan bangsa. Semuanya itu tergantung kepada keinginan dari tiap-tiap orang untuk mengarahkannya agar dapat mencapai cita-cita.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses, perbuatan dan cara mendidik.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal I "Pendidikan adalah usaha sadar dan

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa mendidik merupakan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya (Abu Ahmadi, 2003). Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang dasar yang harus dilakukan secara sadar untuk dapat memperbaiki taraf hidup manusia.

Pendidikan dapat dibedakan dalam tiga bagian yaitu sebagai berikut.

- 1) Pendidikan formal, yakni jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Tujuan pengadaan lembaga pendidikan formal adalah: (1) tempat sumber ilmu pengetahuan, (2) tempat untuk mengembangkan bangsa, (3) tempat untuk menguatkan masyarakat bahwa pendidikan itu penting guna bekal kehidupan di masyarakat sehingga siap untuk dipakai.

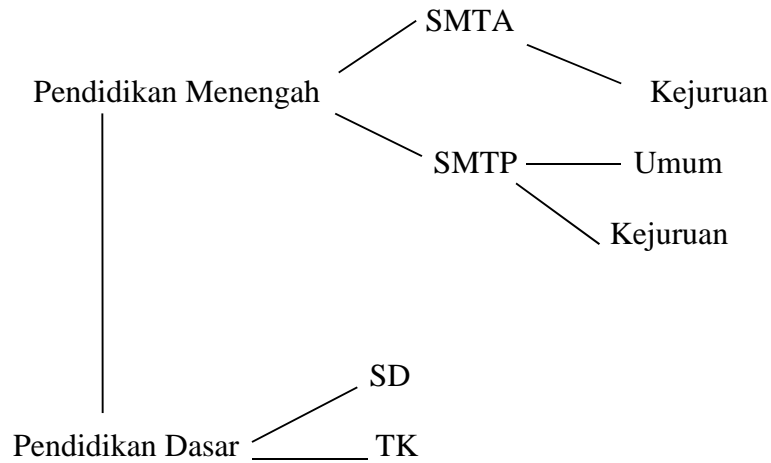
Jenjang pendidikan Formal dan jenis-jenis lembaga formal dapat digambarkan sebagai berikut. (Abu Ahmadi, dkk. 2003: 163).

Gambar 1. Jenjang Lembaga Pendidikan Formal

Perguruan tinggi



Umum



2) Pendidikan non formal, yakni jalur pendidikan di luar sekolah formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Semua bentuk pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja, tertib, dan terencana di luar kegiatan persekolahan. Komponen-komponen yang diperlukan seperti berikut.

- a. Guru atau tenaga pengajar atau pembimbing atau tutor.
- b. Fasilitas.
- c. Cara menyampaikan atau metode.
- d. Waktu yang dipergunakan.

3) Pendidikan informal, yaitu pendidikan yang berlangsung seumur hidup yang diperoleh melalui keluarga dan lingkungannya. Namun mungkin juga berlangsung di lingkungan sekitar keluarga tertentu, perusahaan, pasar, terminal dan lain-lain yang berlangsung setiap hari pada waktu tertentu.

Kegiatan pendidikan ini tanpa adanya suatu organisasi yang ketat tanpa adanya program waktu, tak terbatas, dan tanpa adanya evaluasi. Pendidikan ini terjadi di luar sekolah, tetapi juga dapat pada saat suasana pendidikan

formal. Tujuan utamanya adalah memberikan pengaruh kuat terhadap pembentukan pribadi seorang peserta didik.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, tingkat atau jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan dibagi menjadi:

- 1) pendidikan dasar;
- 2) pendidikan menengah pertama dan SMA, menurut sifat atau jenisnya dapat berupa umum atau kejuruan; dan
- 3) pendidikan tinggi, merupakan kekuasaan pada keahlian tertentu.

Tingkat pendidikan anak adalah lamanya pendidikan formal tertinggi yang pernah ditempuh untuk tingkat pendidikan anak adalah dengan menghitung lamanya tahun sukses anak menjalani pendidikan.

Hakekatnya anak juga memerlukan suatu pendidikan karena merupakan usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah serta berlangsung seumur hidup. Hal ini terbukti dengan adanya pendidikan di lingkungan keluarga dan pendidikan di lingkungan masyarakat. Pendidikan anak di dalam keluarga merupakan hal yang sangat penting untuk memperbaiki tingkat hidup dalam keluarga. Dengan pendidikan diharapkan kelak anak akan menjadi manusia atau warga masyarakat yang terampil dan mampu menyesuaikan diri dengan sekitarnya dan mengatasi masalah dalam kehidupannya pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Pentingnya pendidikan dapat dilihat sebagai berikut.

1. Segi anak

Anak adalah makhluk yang sedang tumbuh, oleh karena itu pendidikan penting sekali karena mulai dari sejak bayi belum dapat berbuat sesuatu untuk kepentingan dirinya, baik untuk mempertahankan hidup maupun merawat diri, semua kebutuhan tergantung pada orang lain.

2. Segi orang tua

Pendidikan merupakan dorongan orang tua, yaitu hati nuraninya yang terdalam yang mempunyai nilai kodrati untuk mendidik anaknya baik dalam segi psikis, sosial, emosi, maupun intelegimentasinya agar memperoleh keselamatan, kepandaian, agar mendapat kebahagiaan hidup yang mereka idam idamkan, sehingga ada tanggung jawab moral atas hadirnya anak tersebut, untuk dapat dididik dengan sebaik-baiknya.

Sebagaimana diketahui, bahwa pendidikan merupakan pekerjaan yang kompleks dan membutuhkan waktu yang lama. Adapun tujuan pendidikan dalam Abu Ahmadi, dkk (2003:105--108) adalah sebagai berikut. (1) Tujuan umum, merupakan tujuan akhir yang hendak dicapai dalam suatu pendidikan yaitu membentuk manusia yang sempurna. (2) tujuan Khusus, merupakan tujuan-tujuan pendidikan yang telah disesuaikan dengan keadaan-keadaan tertentu, dalam rangka untuk mencapai tujuan umum pendidikan. Seperti, disesuaikan dengan cita-cita pembangunan suatu bangsa, disesuaikan dengan tugas dari suatu badan atau badan pendidikan, disesuaikan dengan bakat kemampuan peserta didik, dan disesuaikan dengan tingkat pendidikan. (3) Tujuan tak lengkap, merupakan tujuan dari aspek-aspek pendidikan. (4) Tujuan insidental, tujuan ini timbul secara

mendadak, kebetulan dan hanya bersifat sesaat, misalnya diadakan darmawisata ke suatu tempat. (5) Tujuan sementara, merupakan tujuan-tujuan yang ingin kita cari dalam fase-fase tertentu dari pendidikan. (6) Tujuan perantara, merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain.

Selain tujuan dari pendidikan, ada hal yang dapat memungkinkan dalam pendidikan atau dapat dikatakan faktor pendidikan. Faktor pendidikan memuat kondisi-kondisi yang memungkinkan terlaksananya kegiatan pendidikan. Faktor pendidikan ini juga sering dikenal dengan komponen pendidikan, ada lima komponen pendidikan, yaitu sebagai berikut.

- 1) Tujuan pendidikan.
- 2) Pendidik.
- 3) Anak didik atau peserta didik.
- 4) Lingkungan.
- 5) Alat belajar.

Sistem pendidikan yang ada di berbagai negara berkembang, kadang-kadang bukan mengurangi, namun justru memperburuk ketimpangan pendapatan. Alasan utama dari efek buruk pendidikan formal atas distribusi pendapatan adalah adanya korelasi yang positif antara tingkat pendidikan seseorang dengan penghasilannya seumur hidup. Korelasi ini dapat dilihat terutama pada mereka yang menyelesaikan sekolah menengah dan universitas.

Pendapatan mereka 300 persen hingga 800 persen lebih besar dari pendapatan para pekerja yang hanya berpendidikan sekolah dasar atau kurang dari itu. Karena tingkat penghasilan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Jelas

ketimpangan pendapatan akan bertambah buruk mengingat para pelajar dari keluarga yang berpenghasilan tinggi jauh lebih besar peluangnya untuk meneruskan pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Jelaslah bahwa peluang yang ada untuk menapaki sekolah-sekolah lanjutan dan universitas tidak seimbang. Anak-anak dari pekerja atau petani miskin dalam prakteknya sangat sulit untuk meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan demikian jelas pula bahwa sistem pendidikan yang ada di negara-negara dunia ketiga itu sesungguhnya justru cenderung mempertahankan atau bahkan memperburuk ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat.

Ada dua alasan ekonomi mendasar yang memaksa kita percaya bahwa sistem pendidikan di banyak negara berkembang pada dasarnya tidak memperhatikan aspek pemerataan (*equality*), dalam arti anak-anak dari keluarga miskin tidak dibantu sedikit pun untuk meningkatkan kesempatannya yang sangat terbatas itu dalam memperoleh dan menyelesaikan program pendidikan pada segala tingkatan. Apalagi jika kesempatan mereka itu dibandingkan dengan kesempatan anak-anak dari keluarga kaya. Pertama, biaya-biaya individu untuk menempuh pendidikan sekolah dasar secara relatif jauh lebih tinggi bagi anak orang miskin, daripada biaya-biaya yang harus dipikul oleh anak-anak dari keluarga kaya. Kedua, manfaat yang diharapkan dari pendidikan sekolah dasar bagi anak-anak dari keluarga miskin justru lebih rendah. Dengan demikian adanya biaya yang lebih tinggi dibarengi dengan manfaat yang lebih rendah. Tingkat investasi pendidikan dari penduduk miskin sangat terbatas, sehingga kemungkinan besar ia akan mengalami putus sekolah pada awal tahun pendidikannya.

Pertama, tingginya biaya oportunitas tenaga kerja yang harus ditanggung keluarga miskin jika anaknya bersekolah. Program wajib belajar yang menyediakan bangku cuma-cuma memang tidak membebankan biaya moneter atau pungutan uang.

Akan tetapi, bagi keluarga-keluarga miskin pendidikan tidak pernah cuma-cuma.

Anak-anak yang telah mencapai usia sekolah dasar umumnya diperlukan

tenaganya di lahan pertanian keluarga, atau sekedar membantu menjajakan barang

dagangan. Jika mereka berangkat ke sekolah, maka keluarga menanggung biaya

kerugian, kerugian itu muncul karena keluarga yang bersangkutan harus

kehilangan input tenaga kerja berharga yang sangat diperlukannya.

Sebagai akibat dari biaya yang lebih tinggi, kehadiran dan prestasi di sekolah

cenderung lebih rendah bagi anak-anak keluarga miskin bila dibandingkan dengan

anak-anak dari keluarga yang berpendapatan lebih tinggi. Mereka seringkali harus

membolos untuk membantu orang tuanya, mereka juga tidak banyak waktu untuk

belajar di rumah sehingga nilai-nilai raport mereka pun tidak memuaskan. Anak-

anak dari keluarga miskin dan khususnya yang berada di daerah pedesaan, jarang

melanjutkan pendidikan mereka hingga tamat, prestasi yang buruk ini tidak

mempunyai hubungan sama sekali dengan kemampuan kognitif atau kecerdasan

anak-anak tersebut. Hal tersebut hanya menunjukkan kondisi lingkungan dan daya

dukong ekonomi keluarga mereka yang kurang menguntungkan.

Pendidikan nampaknya juga merupakan salah satu faktor pendorong yang penting

bagi terjadinya proses migrasi internal. Ketimpangan sistem pendidikan di negara-

negara sedang berkembang nampak lebih mencolok pada pendidikan tingkat

universitas, yang sebagian atau seluruh biayanya disubsidi oleh pemerintah.

Mengingat sebagian besar mahasiswa universitas berasal dari golongan berpendapatan tinggi.

Peranan ekonomi dalam dunia pendidikan cukup menentukan, tetapi bukan memegang peranan utama. Sebab ada hal lain yang lebih menentukan hidup matinya dan maju mundurnya suatu pendidikan. Memang benar dalam dunia modern ini lebih-lebih pada zaman pasca modern seperti sekarang, hampir semuanya dikendalikan oleh uang. Sehingga tidak mengherankan kalau tujuan kebanyakan bersekolah agar bisa mencari penghasilan.

Dunia pendidikan adalah lembaga yang berkewajiban mengembangkan individu manusia ke arah mana tujuan hidup seseorang dan hidup yang bagaimana diinginkan banyak dipengaruhi oleh pendidikan yang diterima di sekolah dan perguruan tinggi.

Sebagai tempat pembinaan, pendidikan tidak memandang ekonomi sebagai pemeran utama seperti halnya di dunia bisnis. Ekonomi memegang peran yang cukup menentukan. Sebab tanpa ekonomi yang memadai, pendidikan tidak akan berjalan dengan baik dan lancar.

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan individu dalam mengelola usaha maupun di dalam meningkatkan produksi. Tingkat pendidikan yang belum mencukupi sangat mempengaruhi kesejahteraan, karena mengakibatkan penerimaan teknologi baru serta pembangunan akan terhambat. Begitu pentingnya pendidikan yang menentukan di dalam meningkatkan kualitas hidup dan mutu kehidupan keluarga TKI.

E. Ketenagakerjaan

1. Tenaga Kerja

Sejak tahun 1970 pembangunan ekonomi mengalami redefinisi. Sejak tahun tersebut muncul pandangan baru yaitu tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi tidak lagi menciptakan tingkat pertumbuhan GNP yang setinggi-tingginya melainkan penghapusan atau pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang (Todaro, 2004: 21). Sesuai dengan tujuan pembangunan tersebut pembangunan suatu negara boleh dikatakan tidak berhasil apabila tidak dapat mengurangi kemiskinan, memperkecil ketimpangan pendapatan serta menyediakan lapangan kerja yang cukup bagi penduduknya.

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya menggunakan tolok ukur ekonomi saja melainkan juga harus didukung oleh indikator-indikator sosial (non ekonomi), antara lain seperti tingkat melek huruf, tingkat pendidikan, kondisi-kondisi dan kualitas pelayanan kesehatan, kecukupan akan kebutuhan perumahan. Selanjutnya menurut Todaro, ada tiga nilai inti dari pembangunan, yaitu sebagai berikut.

- 1) Kecukupan yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar (*basic needs*) yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan keamanan.
- 2) Jati diri, manjadi manusia seutuhnya, yaitu diartikan sebagai adanya dorongan-doroagan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri, untuk merasa diri pantas dan layak melakukan atau mengejar sesuatu.

- 3) Kebebasan dari sikap menghamba kemerdekaan atau kebebasan di sini Hendaknya diartikan secara luas sebagai untuk berdiri tegak diperbudak oleh pengejaran aspek-aspek materiil dalam kehidupan.

Lebih lanjut Todaro menyatakan bahwa pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multi dimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, di samping mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Pembangunan manusia baik di tingkat global, tingkat nasional maupun daerah ditekankan pada pembangunan yang berpusat pada manusia yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan dan bukan sebagai alat pembangunan.

Berbeda dengan konsep pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan menguntungkan manusia. Pembangunan manusia memperkenalkan konsep yang lebih luas dan lebih komprehensif yang mencakup semua pilihan yang dimiliki oleh manusia di semua golongan masyarakat pada semua tahap pembangunan.

Pembangunan manusia lebih jauh diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, serta kemandirian (*self empowerment*) secara berkelanjutan.

Sebagian besar masyarakat di Indonesia menyadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku (*actor*) dalam mencapai tujuan pembangunan. Selain dengan itu, pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Pembangunan ketenagakerjaan

diselenggarakan atas asas keterpaduan dan kemitraan. Oleh karena itu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan yang telah ditularkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan sebagai berikut.

- a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal.
- b. Menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional.
- c. Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraannya.
- d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan pemerataan pembangunan di berbagai bidang untuk mengimbangi pesatnya pertumbuhan penduduk. Pembangunan merupakan suatu proses yang terus menerus menuju arah yang lebih baik, dan juga memiliki sasaran yang jelas dari segala segi kehidupan. Hal ini seperti dikemukakan oleh Dorojatun Koentjoro Jakti (dalam Mulyono dan Evers, 1982: 3--4), bahwa pembangunan mempunyai lima sasaran pokok sebagai berikut.

1. Dipenuhinya kebutuhan pangan, sandang dan papan. Peralatan sederhana dan berbagai kebutuhan yang di pandang perlu.
2. Dibukanya kesempatan luas untuk memperoleh berbagai jasa, pendidikan untuk anak dan onang tua, program prefentif dan kuratif, kesehatan, air minum, permukiman dan lingkungan yang mempunyai infrastruktur dan komunikasi baik baik rural maupun urban.
3. Dijaminnya hak untuk memperoleh kesempatan kerja yang produktif, termasuk menciptakan sendiri, yang memungkinkan adanya balas jasa yang

seimbang untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga.

4. Terbinanya prasarana yang memungkinkan produksi barang dan jasa ataupun dari pedagang internasional untuk memperolehnya dengan kemampuan menyisihkan tabungan bagi pembiayaan tabungan selanjutnya.
5. Menjamin adanya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek-proyek.

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dikatakan bahwa dalam upaya melaksanakan pemerataan pembangunan yang diarahkan ke berbagai bidang dan salah satu sarannya adalah pemerataan pembangunan di bidang ekonomi, dengan menambah pendapatan dan memperluas kesempatan kerja. Ini berarti untuk mewujudkan tujuan pembangunan secara nyata dan terpenuhinya baik tujuan di bidang spiritual maupun material yang saat ini sangat penting adalah pemerataan pembangunan yang ditunjukkan pada bidang pendidikan dan ekonomi seperti yang telah dijelaskan.

Kesimpulannya adalah bahwa ilmu ekonomi pembangunan adalah bentuk pengembangan lebih lanjut yang sangat penting dari ilmu ekonomi tradisional dan ilmu ekonomi politik. Selain mengulas tentang alokasi sumber daya yang seefisien mungkin dan pertumbuhan output agregat secara berkesinambungan dari waktu ke waktu, ilmu ekonomi pembangunan menitik beratkan perhatian kepada berbagai mekanisme ekonomi, sosial, dan institusional yang harus diciptakan demi meningkatnya standar hidup miskin di negara-negara dunia.

Ilmu ekonomi pembangunan juga memberikan perhatian besar kepada formulasi kebijakan-kebijakan publik yang di buat demi menghadirkan

serangkaian transformasi ekonomi, sosial dan insfuksional yang sekiranya berdampak positif terhadap kondisi masyarakat secara keseluruhan dalam waktu yang singkat. Jika tidak maka akan terjadi kesenjangan antara aspirasi dan kenyataan akan terus melebar dari tahun ke tahun.

Adapun tujuan inti pembangunan, yakni: (1) peningkatan tersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan; (2) peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materi, melainkan menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan; (3) perluasan pilihan-pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu dan bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap yang menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara-negara lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

Pemerintah diharapkan dapat menyusun dan menetapkan perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja dimaksudkan agar dapat dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi dan implementasi program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Penyusunan perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan. Informasi ketenagakerjaan yang harus disusun seminimal mungkin meliputi:

- 1) penduduk dan tenaga kerja;
- 2) kesempatan kerja;
- 3) pelatihan kerja;
- 4) produktifitas tenaga kerja;
- 5) hubungan industrial;
- 6) kondisi lingkungan kerja; dan
- 7) pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja.

Informasi ketenagakerjaan diperoleh dari seluruh pihak yang terkait baik dari instansi pemerintahan maupun dari instansi swasta.

Istilah hukum ketenagakerjaan merupakan istilah baru dalam bidang ilmu hukum dan ilmu perburuhan pada khususnya, karena istilah itu timbul sebagai akibat dari tuntutan perkembangan Hukum Perburuhan itu sendiri serta perkembangan hukum nasional yang di dasarkan pada sumber dari segala sumber hukum yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Rumusan tentang hukum ketenagakerjaan sendiri tentunya tidak jauh berbeda dengan pengertian hukum pada umumnya. Pengertian atau definisi sepanjang perkembangan zaman senantiasa mengikuti selera dan pandangan para ahli hukum di bidang ketenaga kerjaan, sehingga tidak harus terpaksa pada rumusan tertentu.

Pada dasarnya hukum ketenagakerjaan mengatur tentang hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, antara pekerja dan pengusaha dalam kaitannya dengan hubungan kerja. Yaitu apa yang menjadi hak bagi pekerja, merupakan kewajiban bagi pengusaha. Sebaliknya apa yang menjadi hak bagi pengusaha, merupakan

kewajiban bagi pekerja, sehingga tercermin adanya nilai-nilai keadilan sosial dalam hubungan kerja tersebut.

Agar hak dan kewajiban terpenuhi sebagaimana mustinya, maka perlu adanya perlindungan terutama terhadap kepentingan pekerja sebagai pihak yang lemah dengan menetapkan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa pengusaha untuk melaksanakan kewajibannya selain memperoleh hak dari pekerja. Hal ini dapat dipahami karena pengusaha sebagai pemilik modal secara ekonomis mempunyai hubungan yang kuat dibanding pekerja.

Walaupun antara pekerja dan pengusaha mempunyai kebebasan untuk mengadakan peraturan-peraturan tertentu (perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama), namun peraturan-peraturan tersebut tidak boleh bertentangan peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah dalam rangka perlindungan. Sebagai contoh isi suatu perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama yang di buat antara pekerja dan pengusaha tidak boleh bertentangan dengan perjanjian perburuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Dengan demikian, dapat pula dipahami bahwa Hukum Ketenagakerjaan sesuai hakikatnya dan fungsinya selain bersifat mengatur sebagai hukum privat juga bersifat memaksa sebagai hukum publik.

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat . Pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tersebut menyempurnakaa pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang No.14 tahun 1969 Tentang Ketentuan pokok

Ketenagakerjaan yang memberikan pengertian:

“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”.

Berdasarkan pengertian tersebut tampak perbedaan yakni dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan revisi dari Undang-Undang No 14 Tahun 1969 Tentang Ketenagakerjaan tidak lagi memuat kata-kata baik di dalam maupun di luar hubungan kerja dan adanya penambahan kata sendiri pada kalimat memenuhi kebutuhan sendiri dan masyarakat. Penggunaan kata di dalam maupun di luar hubungan kerja pada pengertian tenaga kerja tersebut sangat beralasan karena dapat mengacaukan makna tenaga kerja itu sendiri seakan-akan ada yang di dalam dan ada pula di luar hubungan kerja serta tidak sesuai dengan konsep tenaga kerja dalam pengertian yang umum. Demikian pula dengan penambahan kata sendiri dan masyarakat karena barang dan jasa yang dihasilkan oleh tenaga kerja tidak hanya untuk masyarakat tetapi juga untuk diri sendiri, dengan demikian, sekaligus menghilangkan kesan bahwa selama ini tenaga kerja hanya bekerja untuk orang lain dan melupakan dirinya sendiri.

Tenaga kerja merupakan istilah yang identik dengan istilah personalia, di dalamnya meliputi buruh, karyawan, dan pegawai (Siswaanto Sastrohadiwiryo, 2003: 27). Secara deskriptif perbedaan antara buruh, karyawan, dan pegawai adalah sebagai berikut.

1. Buruh adalah mereka yang bekerja pada usaha perorangan dan diberikan imbalan kerja secara harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan

kedua belah pihak, baik secara lisan maupun tertulis yang biasanya imbalan kerja tersebut diberikan secara harian.

2. Karyawan adalah mereka yang bekerja pada suatu badan usaha atau perusahaan, baik swasta maupun pemerintah dan diberikan imbalan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat harian, mingguan, maupun bulanan yang biasanya imbalan tersebut diberikan secara mingguan.
3. Pegawai (Pegawai Negeri) adalah mereka yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam yang berlaku, diangkat oleh pejabat negeri atau tugas negara ditetapkan berdasarkan peraturan dan di gaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tenaga kerja (*manpower*) adalah penduduk yang berumur di dalam batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Tenaga kerja dipilih dalam dua kelompok yaitu angkatan kerja (*labor force*) dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja. Sedangkan yang termasuk dalam bukan angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia bekerja namun tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan yakni orang-orang yang kegiatannya bersekolah (pelajar dan mahasiswa).

Angkatan kerja juga dibedakan menjadi dua kelompok yaitu pekerja dan pengangguran. Yang dimaksud dengan pekerja ialah orang-orang yang mempunyai pekerjaan, mencakup orang yang mempunyai pekerjaan dan memang sedang bekerja, serta orang yang mempunyai pekerjaan namun untuk

sementara waktu kebetulan tidak bekerja. Sedangkan pengangguran merupakan orang yang tidak mempunyai pekerjaan, lengkapnya orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari kerja.

Angkatan kerja tumbuh secara cepat. Angkatan kerja yang demikian tentu akan membawa beban tersendiri bagi perekonomian, yakni penciptaan dan perluasan lapangan pekerjaan. Jika lowongan kerja baru tidak mampu menampung semua angkatan kerja baru maka sebagian angkatan kerja baru itu akan memperpanjang barisan pengangguran yang sudah ada. Penciptaan lapangan kerja inilah yang sekarang menjadi salah satu masalah rawan dalam pengangguran ekonomi di tanah air.

Penelitian ini yang di maksud tenaga kerja adalah buruh yang bekerja di luar negeri atau yang biasa disebut Tenaga kerja Indonesia (TKI) . Dalam perkembangan hukum perburuhan di Indonesia, istilah buruh diupayakan untuk diganti dengan istilah pekerja sebagaimana yang telah diusulkan oleh pemerintah (Depnaker). Alasan pemerintah karena istilah buruh kurang sesuai dengan kepribadian bangsa, buruh lebih cenderung menunjuk pada golongan yang selalu ditekan dan berada di bawah pihak lain yaitu majikan.

Berangkat dari sejarah penyebutan istilah buruh seperti tersebut di atas, istilah buruh kurang sesuai dengan perkembangan sekarang, buruh sekarang ini tidak lagi sama buruh masa lalu yang hanya bekerja pada sektor non formal seperti tukang, kuli, pembantu rumah tangga dan sejenisnya, tetapi juga sektor formal seperti Bank, Hotel, dan lain-lain. Karena itu lebih tepat jika menyebutnya dengan istilah pekerja. Dalam RUU Ketenagakerjaan ini sebelumnya hanya

menggunakan istilah pekerja saja. Namun, agar selaras dengan Undang-undang yang lahir sebelumnya yaitu Undang-Undang No.21 Tahun 2000 yang menggunakan istilah Serikat Buruh/Pekerja, maka istilah yang digunakan adalah pekerja/buruh. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 4 memberikan pengertian Pekerja/ buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Setiap orang buruh/pekerja yang bekerja pada siapa saja baik perorangan, persekutuan, badan hukum atau badan lainnya dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun.

Penegasan imbalan dalam bentuk apa pun ini perlu karena selama ini diidentikkan dengan uang, padahal ada pula buruh atau pekerja yang menerima imbalan dalam bentuk barang. Tenaga kerja merupakan modal utama dalam pelaksanaan masyarakat Pancasila. Tujuan terpenting dari pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan yang dijamin haknya.

Berhubungan dengan hal tersebut, maka Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 merupakan Undang-Undang pokok mengenai tenaga kerja mengatur hak-hak dari pada tenaga kerja di dalam beberapa pasal sebagai berikut.

- a. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.
- b. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.
- c. Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan

dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.

- d. Tenaga kerja berhak memperoleh kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja.
- e. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.
- f. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.
- g. Setiap pekerja/buruh berhak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan kerja dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perilaku yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai keagamaan.
- h. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- i. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.
- j. Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
- k. Dalam mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja buruh dan pengusaha, pemerintah wajib melaksanakan pengawasan, dan penegakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
- l. Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.

Selain hak tenaga kerja agar terselenggaranya hubungan yang baik antara tenaga kerja dengan atasan (pengusaha) maka tenaga kerja harus melaksanakan kewajiban-kewajiban diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Wajib melakukan prestasi atau pekerjaan bagi majikannya.
2. Wajib mematuhi peraturan perusahaan.
3. Wajib mematuhi perjanjian kerja.
4. Wajib mematuhi perjanjian perburuhan.
5. Wajib mematuhi rahasia perusahaan.
6. Wajib memenuhi peraturan majikan.

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Masalah tenaga kerja merupakan salah satu masalah nasional yang cukup berat dan kompleks. Rendahnya tingkat pendidikan dan lemahnya perlindungan atau kesejahteraan masyarakat di suatu negara akan mempengaruhi kualitas tenaga kerja. Tenaga kerja yang berkualitas merupakan modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan ekonomi.

Ketenagakerjaan adalah merupakan bagian penting bagi suatu perusahaan karena menyangkut eksistensi suatu perusahaan dalam dunia industri. Lingkup ketenagakerjaan meliputi fungsi pekerja dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Di sisi lain pengusaha memiliki fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan

kerja dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis dan berkeadilan. Memperhatikan fungsi para pihak maka hubungan yang tercipta antara pekerja dan pengusaha atau yang biasa disebut dengan hubungan industrial, harus dijalankan secara selaras dan seimbang guna mencapai tujuan perusahaan.

Permasalahan utama yang muncul dalam hubungan industrial ini, adalah menyangkut perselisihan mengenai hak-hak dan kepentingan dari pekerja dalam suatu perusahaan, polemik mengenai pilihan hukum dalam penyelesaian juga sering muncul. Kontroversi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain dikarenakan sering berubahannya peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan, ketidaksesuaian pemahaman antara pengusaha dengan pekerja.

Ketidaksesuaian paham antara pekerja dan pengusaha di karenakan pengusaha memandang mengeluarkan output biaya produksi dan konsumsi seminimal mungkin untuk mendapatkan *income* yang maksimal, sedangkan disisi lain para pekerja menginginkan terjaminnya hak-hak dan kepentingan mereka selaku pekerja yang telah memberikan sumbangsih kepada perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. Akibat yang timbul dari perselisihan ini adalah aksi mogok yang dilakukan oleh pekerja, pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon dan uang penghargaan masa kerja bagi pekerja yang telah memenuhi masa kerja tertentu.

Masalah yang sering timbul dalam ketenagakerjaan adalah terjadinya ketidakseimbangan antara penawaran tenaga kerja (*supply of labor*) dan permintaan akan tenaga kerja (*demand for labor*) pada tingkat upah tertentu.

Ketidakseimbangan ini dapat berupa *excess supply of labor*, yaitu apabila

penawaran lebih besar dari pada permintaan akan tenaga kerja atau terjadi *excess demand for labor*, yaitu apabila terjadi permintaan akan tenaga kerja lebih besar dari pada penawaran akan tenaga kerja. Lewis, A dalam Todaro (1985: 66) mengemukakan teorinya mengenai ketenagakerjaan, yaitu; kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan masalah. Kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan output dan penyediaan pekerja di sektor lain. Selanjutnya Lewis mengemukakan bahwa ada dua sektor di dalam perekonomian negara sedang berkembang, yaitu sektor modern dan sektor tradisional. Sektor tradisional tidak hanya berupa sektor pertanian di pedesaan melainkan juga termasuk sektor informal di perkotaan (pedagang kaki lima, pengecer, pedagang angkringan).

Sektor informal mampu menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada selama berlangsungnya proses industrialisasi, sehingga disebut kutub pengaman ketenagakerjaan. Dengan terserapnya kelebihan tenaga kerja disektor industri (sektor modern) oleh sektor informal, maka pada suatu saat tingkat upah di pedesaan akan meningkat. Peningkatan upah ini akan mengurangi perbedaan tingkat pendapatan antara pedesaan dan perkotaan, sehingga kelebihan penawaran pekerja tidak menimbulkan masalah pada pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya kelebihan pekerja justru merupakan modal untuk mengakumulasi pendapatan, dengan asumsi perpindahan tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor modern berjalan lancar dan perpindahan tersebut tidak pernah menjadi terlalu banyak (Todaro, 2004: 132).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa ketidakstabilan dan rendahnya pendapatan menyebabkan masyarakat merelakan diri untuk

nasib di negeri orang.

Masalah ketenagakerjaan memang sangat luas dan kompleks. Masalah ketenagakerjaan mengandung dimensi ekonomis, dimensi sosial kesejahteraan dan dimensi sosial politik. Dari segi dimensi ekonomis, pembangunan ketenagakerjaan mencakup penyediaan tenaga-tenaga ahli dan terampil sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Untuk itu harus dibangun sistem pelatihan kerja, sistem informasi pasar kerja dan sistem antar kerja, baik secara lokal dan antar daerah, maupun ke luar negeri.

Perluasan kesempatan kerja juga merupakan dimensi ekonomis ketenagakerjaan, karena melalui kesempatan kerja pertumbuhan ekonomi diciptakan sekaligus memberikan penghasilan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Penciptaan kesempatan kerja dilakukan dengan menumbuhkan dunia usaha melalui berbagai kebijakan antara lain di bidang produksi, moneter, fiskal, distribusi, harga dan upah, ekspor-impor, serta di bidang ketenagakerjaan.

Pengiriman tenaga kerja migran Indonesia (TKI) ke luar negeri secara resmi diprogramkan oleh pemerintah sejak 1975. Program ini merupakan salah satu kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan. Migrasi internasional berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi dan transisi demografi dalam suatu negara. Ketika suatu negara mengalami kemunduran ekonomi yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah dan pertumbuhan populasinya masih tinggi, aktivitas perekonomian negara tersebut tidak dapat menyerap kelebihan tenaga kerja. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri merupakan salah satu pemecahan masalah ketenagakerjaan (Tjiptoherijanto, 2000).

2. Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Perpindahan penduduk melampaui batas negara atau disebut dengan migrasi internasional secara umum terjadi karena dorongan faktor-faktor dari dalam negeri, berupa faktor sosial, ekonomi, politik dan bencana alam. Migrasi internasional juga disebabkan adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk di suatu negara, sehingga aktivitas perekonomian tidak dapat menyerap kelebihan tenaga kerja. Migrasi internasional dipandang sebagai keputusan yang rasional karena adanya tekanan kondisi eksternal yang dihadapi penduduk. Migrasi tenaga kerja merupakan bagian dari proses migrasi internasional. Migrasi tenaga kerja internasional bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja jangka pendek (*short-terms labor shortages*) di negara tujuan migrasi. Penyebab utama terjadinya migrasi internasional adalah ketidaksamaan tingkat upah yang terjadi secara global. Perpindahan penduduk dari negara pengirim (*sending country*) ke negara penerima tenaga kerja migran (*receiving country*) akan membuat negara pengirim mendapat keuntungan *remittance*, sedangkan negara penerima akan mendapat keuntungan pasokan tenaga kerja murah (Safrida, 2008).

Pengiriman tenaga kerja migran Indonesia (TKI) ke luar negeri secara resmi diprogramkan oleh pemerintah sejak 1975. Program ini merupakan salah satu kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan. Migrasi internasional berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi dan transisi demografi dalam suatu negara. Ketika suatu negara mengalami kemunduran ekonomi yang ditandai dengan pertumbuhan

ekonomi yang rendah dan pertumbuhan populasinya masih tinggi, aktivitas perekonomian negara tersebut tidak dapat menyerap kelebihan tenaga kerja. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri merupakan salah satu pemecahan masalah ketenagakerjaan (Tjiptoherijanto, 2000). Dalam masalah migrasi internasional tenaga kerja, kualitas pendidikan menjadi pertimbangan penting dalam mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Menjadi tenaga kerja migran tidak hanya mempertimbangkan *skill* atau keahlian saja, tetapi pemahaman dan wawasan terutama budaya masyarakat tempat dimana mereka akan bekerja juga merupakan hal yang tidak dapat diabaikan (Safrida, 2008). Kualitas tenaga kerja dan tingkat pendidikan memiliki keterkaitan yang kuat, tenaga kerja migran yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, umumnya bekerja pada lembaga jasa yang memerlukan keahlian khusus dari pekerjanya. Dalam teori ekonomi sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan dan pelatihan tidak hanya menambah pengetahuan tetapi juga meningkatkan keterampilan bekerja dengan demikian produktivitas kerja akan meningkat. Pendidikan merupakan tugas untuk meningkatkan pengetahuan, pengertian atau sikap para tenaga kerja sehingga mereka dapat lebih menyesuaikan dengan lingkungan kerja mereka. Pendidikan bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir seorang pekerja.

Pelatihan adalah pendidikan dalam arti sempit. Pelatihan kerja diadakan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan keterampilan tenaga kerja agar dapat meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja.

Tenaga kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam

jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yaitu: Tenaga kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja memberi izin pengiriman TKI ke luar negeri dengan pertimbangan, sebagai berikut.

- 1) Mengurangi jumlah pengangguran yang semakin besar dibandingkan dengan tersedianya lowongan pekerjaan di luar negeri.
- 2) Pengiriman TKI ke luar negeri ini pada dasarnya karena adanya permintaan dari luar negeri dan adanya pencari kerja yang berminat bekerja di luar negeri.
- 3) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengiriman TKI ke luar negeri, yaitu:
 - a. mempererat hubungan antar negara (negara pengirim tenaga kerja dengan negara penerima);
 - b. mendorong terjadinya peningkatan kerja dan alih teknologi;
 - c. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya; dan
 - d. meningkatkan pendapatan di dalam neraca pembayaran negara atau devisa.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Calon TKI/TKI bertujuan sebagai berikut.

- 1) Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
- 2) Menjamin dan melindungi calon TKI/TKW sejak di dalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

Syarat-syarat calon TKI adalah sebagai berikut.

- 1) Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun.
- 2) Sehat jasmani dan rohani.
- 3) Tidak dalam keadaan hamil bagi calon TKI perempuan.
- 4) Mempunyai tingkat pendidikan dan keterampilan tertentu.
- 5) Terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan di daerah tempat tinggalnya.
- 6) Memiliki dokumen yang dipersyaratkan.

Setiap calon TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama sebagai berikut.

- 1) Bekerja di luar negeri.
- 2) Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri.
- 3) Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri.
- 4) Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya.
- 5) Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan.

- 6) Memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan.
- 7) Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri.
- 8) Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal.
- 9) Memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.

Setiap calon TKI mempunyai kewajiban sebagai berikut.

- 1) Mentaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri, maupun di negara tujuan.
- 2) Mentaati dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja.
- 3) Membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Memberitahukan atau melaporkan kedatangan, keberadaan dan kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap calon TKI harus memiliki syarat sebagai berikut.

- 1) Usia minimal 18 tahun, kecuali peraturan negara tujuan menentukan lain.
- 2) Memiliki kartu tanda penduduk.
- 3) Sehat mental dan fisik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.

- 4) Sekurang-kurangnya tamat SD (sekolah dasar), memiliki keterampilan atau keahlian atau pengalaman sesuai dengan persyaratan jabatan atau pekerjaan yang diperlukan.
- 5) Ijin dari orang tua atau wali, suami, istri.

Setiap orang yang hendak menjadi TKI harus memenuhi syarat-syarat tersebut.

3. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam Perspektif Gender

Konsep gender berbeda dengan konsep jenis kelamin (sex). Jenis kelamin (sex) merupakan pembagian dua jenis kelamin pada laki-laki dan perempuan yang ditentukan secara biologis dan memiliki sifat-sifat permanen yang tidak dapat berubah dan ditukarkan antara keduanya. Sifat tersebut merupakan kodrat yang diberikan Tuhan kepada setiap laki-laki dan perempuan.

Gender menurut Mansour Fakih (dalam Argyo Demartoto, 2009: 47) mengatakan bahwa gender adalah pemilihan peran, fungsi, kedudukan, tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang berfungsi untuk mengklasifikasikan perbedaan peran yang dikonstruksi secara sosial dan kultural oleh masyarakat, dan bersifat tidak tetap serta bisa dipertukarkan antar keduanya. Dalam kaitannya dengan ilmu sosial, gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam bentuk sosial yang tidak disebabkan oleh perbedaan biologis yang menyangkut jenis kelamin (Mc Donald, 1999).

Menurut pendapat di atas dapat ditarik pengertian bahwa gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang didasarkan

pada bentuk-bentuk kultural masyarakat (peran, fungsi, kedudukan, tanggung jawab) dan bukan atas dasar perbedaan jenis kelamin (sex).

Perbedaan gender sering menimbulkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*), terutama terhadap kaum perempuan baik dilingkungan rumah tangga, pekerjaan, masyarakat kultur, maupun negara. Ketidakadilan tersebut dapat di bagi ke dalam berbagai bentuk antara lain sebagai berikut.

1) Marginalisasi

Yakni proses peminggiran atau penyingkiran terhadap strata kaum yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan pelemahan ekonomi kaum tertentu. Marginalisasi terjadi karena berbagai hal, seperti kebijakan pemerintah, keyakinan, agama, tradisi, kebiasaan, bahkan karena adanya asumsi ilmu pengetahuan sekalipun.

2) Subordinasi

Merupakan penempatan kaum tertentu (perempuan) pada posisi yang tidak penting. Subordinasi berawal dari anggapan yang menyatakan bahwa perempuan adalah kaum yang irasional atau emosional sehingga perempuan tidak cakap untuk memimpin.

3) Stereotipe

Merupakan pelabelan atau penandaan terhadap kaum tertentu. Akan tetapi pada permasalahan gender, stereotipe lebih mengarah pada pelabelan yang bersifat negatif terhadap perempuan. Hal ini terjadi karena pemahaman yang keliru terhadap posisi perempuan.

4) Kekerasan (*violence*)

Merupakan serangan terhadap fisik atau integritas mental psikologi seseorang. Kekerasan karena bias gender disebut *gender related violence*. Kekerasan tersebut terjadi karena disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Bentuk-bentuk kekerasan (*violence*) gender (terhadap perempuan) antara lain pemerkosaan, serangan fisik dalam rumah tangga, kekerasan dalam pelacuran dan pornografi, pemaksaan dalam sterilisasi keluarga berencana (KB), serta pelecehan seksual (Fakih, 2001: 12--21)

5) Beban kerja ganda

Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa lebih cocok mengurus dan bertanggung jawab atas pekerjaan domestik (menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangga, memasak, mencuci, bahkan memelihara anak). Pekerjaan domestik dianggap tidak bernilai dan lebih rendah bila dibandingkan dengan pekerjaan laki-laki karena tidak produktif. Konsekuensinya tersebut harus diterima perempuan yang bekerja di satu sisi harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya, di sisi lain harus bertanggung jawab atas rumah tangganya Hal ini yang menyebabkan bahwa biasanya gender menjadikan perempuan menanggung beban kerja yang bersifat ganda (Fakih, 2001: 75--76).

Indonesia secara normatif tidak pernah membedakan antara perempuan dan laki-laki, termasuk dalam hal memperoleh pekerjaan, Argyo Demartoto (2009) bahwa ada beberapa hal yang dapat dilihat sebagai berikut.

- 1) Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan yang layak".
- 2) Sejak Sidang Umum PBB mengadopsi deklarasi penghapusan Diskriminasi

Terhadap Perempuan Tahun 1967 (*Convention on the Elimination of Discrimination Against Women* atau CEDAW) sebagai dari Deklarasi Universal mengenai hak-hak asasi manusia, Indonesia kemudian meratifikasi Konvensi tersebut dengan menetapkan UU RI No. 7 tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

- 3) Di Bidang Tenaga Kerja Pasal 5 Konvensi yang diratifikasi Indonesia tersebut memberi ketegasan perlakuan terhadap Tenaga Kerja Perempuan. Pasal 5 tersebut bahwa Negara peserta akan menjalankan semua upaya yang tepat sebagai berikut.
 - a) Merubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud agar dapat dihapuskan semua prasangka kebiasaan serta praktek-praktek lainnya yang didasarkan atas ide inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau anggapan stereotipikal tentang peranan laki-laki dan perempuan.
 - b) Menjamin bahwa dalam pendidikan keluarga harus tercakup Pemahaman yang tepat dari kehamilan sampai fungsi sosial dan pengakuan mengenai tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan dalam mengasuh dan membesarkan anak-anak merasa dalam pengertian bahwa dalam semua ini kepentingan anak merupakan pertimbangan utama.
- 4) Bidang Tenaga Kerja Pasal I I Konvensi yang diratifikasi Indonesia memberikan ketegasan perlakuan terhadap Tenaga Kerja Perempuan. Pasal I I tersebut menyatakan antara lain sebagai berikut.

- a. Negara-negara peserta wajib melakukan segala upaya dan langkah yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap di lapangan pekerjaan guna menjamin hak-hak yang sama atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan di lapangan pekerjaan guna menjamin hak-hak yang sama atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan khususnya: (a) hak untuk bekerja sebagai hak asasi manusia; (b) hak atas kesempatan kerja yang sama; (c) hak untuk memilih bebas pekerjaan; (d) hak untuk menerima upah yang sama; (e) hak atas jaminan sosial; dan (f) hak atas perlindungan kesehatan kerja termasuk usaha perlindungan terhadap fungsi melanjutkan keturunan.
- b. Untuk mencegah diskriminasi terhadap perempuan atas dasar perkawinan atau kehamilan dan menjamin hak efektif mereka untuk bekerja, negara-negara peserta wajib membuat peraturan yang tepat: (a) untuk melarang dengan dikenai sanksi pemecatan atas dasar kehamilan atau cuti hamil dan diskriminasi dalam pemberhentian atas dasar status perkawinan; (b) untuk mengadakan cuti hamil dengan bayaran atau dengan tunjangan sosial yang sebanding tanpa kehilangan pekerjaan semula; (c) untuk mengadakan pelayanan sosial seperti penitipan anak; dan (d) untuk memberi perlindungan khusus kepada perempuan selama kehamilan.
- c. Peraturan perundang-undangan yang bersifat melindungi sehubungan dengan hal-hal yang tercakup dalam pasal ini wajib ditinjau kembali secara berkala berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta direvisi, dicabut atau diperluas menurut keperluan.
- d. Ada beberapa ketentuan mengenai Tenaga Kerja perempuan yang

diterbitkan setelah meratifikasi Konvensi dengan UU RI No.7/84 yaitu sebagai berikut.

- a) Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-04/MEN/8 Tentang Pelaksanaan Larangan Diskriminasi pekerjaan perempuan.
- b) Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No PER-03/MEN/1989 Tentang Larangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi pekerja perempuan karena menikah, hamil, atau melahirkan.
- c) Intruksi Menteri Tenaga Kerja No. INS-02a/MEN/1991 Tentang Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Air Susu Ibu bagi pekerja perempuan.

UUD 1945 telah menjamin bahwa setiap warga negara mempunyai kesamaan hak dan kesempatan dalam memperoleh pekerjaan yang layak namun pada kenyataannya, masih terdapat kesenjangan gender (*gender gap*) di bidang tersebut. Perempuan masih tertinggal bila dibandingkan dengan laki-laki dalam memperoleh pekerjaan. Pengangguran terbuka di Indonesia termasuk tinggi, menurut Sakernas Februari 2006, terdapat lebih dari 11 juta pengangguran atau 10,4% dari angkatan kerja usia 15 tahun ke atas. Mungkin akan lebih menarik jika kita lihat perbandingannya menurut wilayah dan jenis kelamin angkatan kerja dan juga tingkat pendidikan yang ditamatkan.

4. Pengambilan Keputusan Bekerja di Luar Negeri

Kesulitan hidup yang di anggap bahwa individu tidak pernah menyerah dalam menghadapinya adalah kesulitan ekonomi. Dalam sebuah keluarga, kesulitan ekonomi diusahakan secara maksimal untuk menghindarinya. Cara yang

dilakukan dapat dilihat dari kegiatan di Desa yang sangat sederhana yaitu dengan pola kerja untuk mencapai pendapatan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan keluarga.

Diperlukan suatu interaksi dalam keluarga artinya baik suami ataupun istri saling membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Seseorang mengambil keputusan untuk bermigrasi menjadi TKI tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhi dirinya sehingga mengambil keputusan menjadi TKI dan bekerja di luar negeri.

Menurut Everett Lee (dalam Winoto, 2009) ada empat faktor yang mempengaruhi seseorang mengambil keputusan untuk melaksanakan proses migrasi, yaitu sebagai berikut.

- 1) Faktor-faktor yang terdapat di daerah asal.
- 2) Faktor-faktor yang terdapat di daerah tujuan.
- 3) Rintangan antara.
- 4) Faktor individu.

Everett Lee melukiskan baik di daerah asal maupun di daerah tujuan ada faktor positif dan negatif yang mempengaruhi seseorang mengambil keputusan bermigrasi. Faktor positif di daerah tujuan adalah faktor yang memberi nilai yang menguntungkan dan faktor negatif di daerah asal adalah faktor yang memberi nilai negatif sehingga seseorang ingin meninggalkan daerah asal.

Rintangan antara mempengaruhi ongkos untuk melakukan perpindahan. Faktor individu merupakan faktor yang paling menentukan dalam mengambil keputusan untuk bermigrasi. Individu atau seseorang yang mengambil keputusan untuk

bermigrasi pasti mempunyai tujuan yang ingin di capai. Ada 7 (tujuh) kategori tujuan masyarakat untuk bermigrasi, yaitu sebagai berikut.

1. Kemakmuran atau kekayaan, meliputi faktor-faktor yang berhubungan dengan keuntungan ekonomi seseorang. Misalnya penghasilan yang tinggi.
2. Status, meliputi sejumlah fakta yang berhubungan dengan kedudukan sosial atau prestise. Misalnya pekerjaan yang bergengsi dan merasa terpandang dalam masyarakat.
3. Kesenangan hidup, dapat dilihat sebagai tujuan dari pencapaian kehidupan atau kondisi pekerjaan yang lebih baik. Kesenangan hidup dimaksudkan sebagai kesenangan secara fisik dan psikologis.
4. Perangsangan terbukanya aktivitas yang menyenangkan atau bebas dari situasi yang tidak menyenangkan. Misalnya kegembiraan dan kegairahan, dapat melakukan hal-hal baru serta bergaul atau bertemu dengan berbagai kalangan masyarakat.
5. Otonomi, mempunyai banyak dimensi tetapi secara umum menunjuk kepada kebebasan pribadi dan kemampuan untuk hidup mandiri. Indikatornya antara lain: kemandirian secara ekonomi, bebas berbicara dan berbuat untuk keinginan sendiri.
6. Afiliasi, menggambarkan adanya nilai hubungan dengan orang lain atau masyarakat. Indikatornya antara lain: merasa hidup dekat dengan famili dan teman-teman, merasa bagian dari kelompok atau masyarakat serta memiliki banyak teman.

7. Moralitas, berhubungan dengan nilai yang diyakini dan sistem yang menentukan cara baik buruknya untuk hidup. Indikatornya antara lain dalam bimbingan budi pekerti luhur, mampu menjalani ibadah agama lingkungan yang baik untuk anak-anak serta hidup dalam masyarakat yang bermoral.

Pendapat di atas dapat dikatakan bahwa seseorang mengambil keputusan bermigrasi untuk bekerja keluar negeri karena beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain: faktor daerah asal yaitu faktor yang mendorong seseorang untuk meninggalkan daerah asalnya, kurangnya kesempatan kerja di daerah asal mempengaruhi seseorang untuk mengambil keputusan bermigrasi atau bekerja ke luar negeri.

Faktor daerah tujuan adalah faktor yang menarik seseorang untuk mengambil keputusan bermigrasi atau bekerja ke luar negeri. Banyaknya kesempatan kerja di daerah tujuan (luar negeri) di tambah dengan penghasilan tinggi yang diperoleh, menarik seseorang untuk mengambil keputusan bermigrasi atau bekerja ke luar negeri.

Penghalang dan rintangan yaitu hal-hal yang menjadi pertimbangan untuk bermigrasi ke luar negeri sehingga mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan untuk bekerja ke luar negeri. Jarak dan biaya untuk bermigrasi adalah hal yang menjadi penghalang. Akan tetapi, dengan adanya faktor yang menarik di daerah tujuan membuat seseorang mengambil keputusan bermigrasi atau bekerja ke luar negeri meskipun jarak dan biaya yang tinggi untuk bermigrasi menjadi penghalang.

Faktor pribadi merupakan persepsi dari individu itu sendiri untuk mengambil keputusan untuk bermigrasi atau bekerja ke luar negeri. Dengan memperoleh penghasilan yang tinggi mempengaruhi seseorang mengambil keputusan bekerja ke luar negeri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang mengambil keputusan untuk bermigrasi ke luar negeri bertujuan mencari rejeki di karenakan kurangnya kesempatan kerja di daerah asal dan banyaknya kesempatan kerja di daerah tujuan (luar negeri). Dengan bekerja ke luar negeri, seseorang memperoleh penghasilan yaag tinggi sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan meningkatkan status sosial ekonominya dalam masyarakat.

4. Hasil Penelitian yang Relevan

Tabel 4. Hasil Penelitin yang Relevan.

No.	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Kesimpulan
1.	Winoto 2009	Pengaruh bekerja di luar negeri terhadap tingkat status sosial ekonomi keluarga (studi kasus pada Tenaga kerja Indonesia {TKI} asal Desa Poncowarno Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah).	Terjadinya mobilitas sosial tenaga Kerja Indoneia(TKI) telah membawa perubahan karena mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan mencapai status sosial yangdi harapkan.
2.	Dewi Novita Sari 2010	Migrasi masyarakat desa dalam perubahan sosial keluarga studi tentang ibu rumah tangga yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di desa	Perubahan sosial keluarga yang terjadi pada keluarga di desa Sukajaya adalah perubahan karena dari salah satu anggota keluarga khususnya

3.	Hartini 2010	<p>Sukajaya Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran</p> <p>Hubungan antara status sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar siswa(studi di SMU negeri 2 Muaradua Oku Selatan)</p>	<p>istri atau Ibu melakukan migrasi ke luar negeri mejadi tenaga Kerja Indonsia (TKI). Perubahan ini berupa status sosial, peran dan norma yang berlaku di dalam keluarga. penyebab migrasi, yakni yang pertama karena faktor ekonomi, yang kedua faktor lingkuagan, yang ketiga faktor keluarga dan yang keempat adalah adanya faktor kesempatan.</p> <p>Yang mempengaruhi prestasi belajar siswa adalah tingkat pendidikan orang tua dan status sosial ekonomi keluarga yang meliputi tingkat pendidixn dan tingkat pendapatan orang tua.</p>
----	-----------------	--	---